

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

AGROEKOWISATA LAMPUNG

TIM PENYUSUN:

Mohammad Syafrizal

Harmono

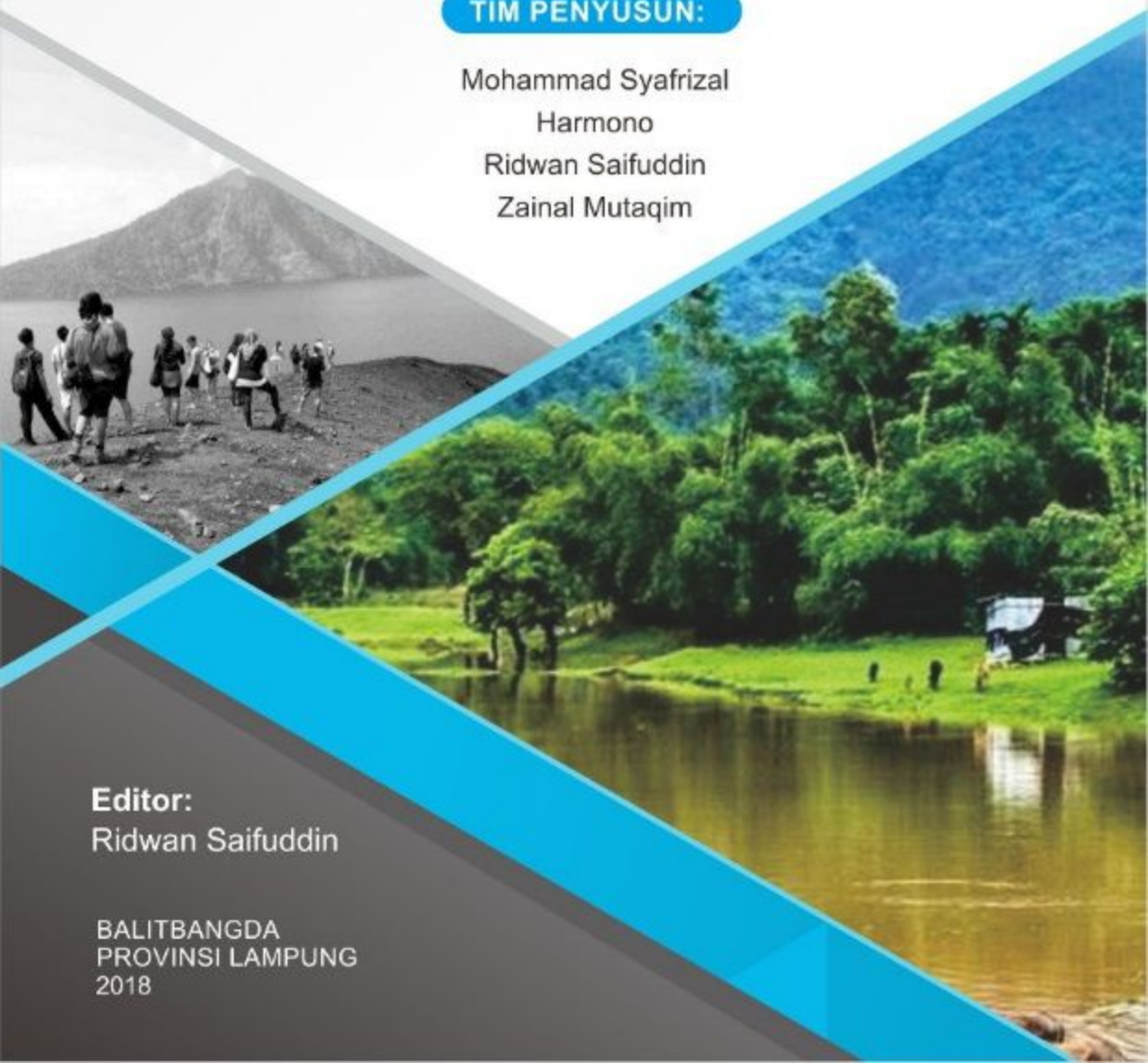
Ridwan Saifuddin

Zainal Mutaqim

Editor:

Ridwan Saifuddin

BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG
2018



Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
AGROEKOWISATA
LAMPUNG

Tim Penyusun:

Mohammad Syafrizal

Harmono

Ridwan Saifuddin

Zainal Mutaqim

BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG

Editor: Ridwan Saifuddin

BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
2018



**BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**

Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Agroekowisata Lampung

Cetakan 2018; 14,5 x 21 cm

ISBN:

Penerbit : BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
Jl. Kantor Pos No.2 Telukbetung, Bandar Lampung Telp/Fax. (0721) 5605759
www.balitbangda.lampungprov.go.id, balitbangdalampung@gmail.com
Tim Penyusun : Mohammad Syafrizal, Harmono, Ridwan Saifuddin, Zainal Mutaqim
Editor : Ridwan Saifuddin

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Agroekowisata Lampung dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yang telah menerbitkan buku ini. Buku ini menawarkan konsep pembangunan antardaerah secara terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan. Ini merupakan model pembangunan yang dibutuhkan pada era industri 4.0 yang mementingkan sinergi.

Kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) saat ini di Provinsi Lampung secara dinamis terus mengalami perubahan perbaikan, menyesuaikan terhadap isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini yang memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing. Peran Agroekowisata Lampung juga sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menuju visi dan misi Provinsi Lampung yang maju dan berdaya saing.

Guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Lampung salah satu strategi kebijakan pembangunan yang saat ini sedang bergulir adalah melalui implementasi Penguatan SIDa. Adapun untuk mencapai SIDa yang optimal, kita perlu mengkomodir berbagai aspek pembangunan secara multidimensional. Sejalan dengan perencanaan program-program pembangunan daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penguatan sistem inovasi harus sinkron dengan RPJMD, sehingga dapat menjamin terlaksananya Roadmap SIDa ini. Kemudian secara bertahap melalui kerangka Sistem Inovasi Daerah, program pembangunan menjadi terkonsep, sinergis, berkelanjutan, serta mampu menciptakan daya saing

daerah.

Oleh karena itu, Buku ini dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah. Model SIDA dalam buku ini perlu diuji dan terus disempurnakan. Kekurangan pasti ada, dan kami akan mengapresiasi dan memperhatikan setiap masukan serta saran untuk penyempurnaan isinya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan buku ini, Semoga bermanfaat bagi Kemajuan Provinsi Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO

**BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR



Kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Provinsi Lampung secara dinamis terus mengalami perbaikan dan penyesuaian dengan isu-isu maupun permasalahan yang berkembang di daerah dan nasional. Sejalan dengan perkembangan perekonomian pada era industri 4.0 ini, yang memberikan sinyal kian pentingnya integrasi dan sinergi sumber daya ekonomi, konsep pengembangan SIDa dengan pendekatan aglomerasi industri semakin dibutuhkan dalam pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.

Pada tingkat regional, Indonesia telah dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang sudah dilaksanakan sejak dua tahun terakhir. Era kompetisi, kompetensi, dan kolaborasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Pemberlakuan MEA dapat dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang kerja sama ekonomi antarkawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, serta modal. Ini perlu kesiapan daerah. Potensi dan sumber daya yang ada tidak akan menjadi unggul secara kompetitif, tanpa dikelola dengan baik dan sistematis. Ketidaksiapan daerah menghadapi dinamika perekonomian yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi—serta alat-alat produksi yang makin canggih—hanya akan membuat daerah dan kehidupan masyarakatnya semakin terpuruk. Ini tentu bukan yang kita harapkan.

Dengan era tata niaga baru tersebut, Provinsi Lampung sebenarnya memiliki peluang memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan skala ekonomi daerah, sebagai basis mendorong tumbuhnya perekonomian lokal, dengan menjadikannya sebagai momentum memacu peningkatan daya saing komoditi dan produk hilir daerah. Konsep SIDa

dibangun sebagai kerangka kerja bagi pemangku kepentingan dalam mengelola potensi dan sumber daya daerah tersebut, sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah secara optimal.

Era liberalisasi ekonomi dan kemajuan teknologi saat ini patut diimbangi upaya-upaya sistematis dan terukur dengan terus meningkatkan sinergitas, terutama dalam meningkatkan dukungan penataan kelembagaan birokrasi, perluasan akses infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, perubahan sikap mental, serta meningkatkan akses finansial terhadap sektor riil, yang kesemuanya bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan nasional.

Terimakasih dan selamat kepada tim penyusun buku SIDA Provinsi Lampung ini. Buku ini merupakan salah satu kontribusi kecil dari Balitbangda Provinsi Lampung untuk mendorong sinergi dan integrasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya pembangunan di masing-masing daerah. Belum sempurna memang. Karenanya, kami mengapresiasi semua saran dan masukan untuk memperbaiki substansi buku ini, serta untuk peningkatan kinerja kelembagaan kelitbang yang ada di Provinsi Lampung.

**KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

TITIK TRANSISI

Kita hidup pada masa di mana dinding runtuh. Kita melihat kebangkitan ekonomi tanpa batas. Dengan teknologi, kita melihat berakhirnya sekat-sekat buatan yang mengurung pikiran manusia. Namun, dinding yang paling menantang tetap bertahan: dinding yang ada di dalam pikiran manusia. Dinding itu umumnya tidak terlihat, tetapi menjadi perintang yang kuat terhadap kepercayaan, komunikasi, dan kreativitas. Kunci untuk merobohkan dinding itu adalah kekuatan internal untuk berpikir “kita,” bukan “saya” (Covey. 117: 2011).

Kemajuan teknologi dan semakin canggihnya alat-alat produksi menjadi penanda era industri baru generasi keempat saat ini. Era di mana batas-batas ruang semakin nisbi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi katalis yang efektif dalam menjembatani batas-batas antarmanusia. Namun, sebagaimana disinyalir Covey, manusia acap membangun batas-batas psikologisnya sendiri, yang tidak bisa diatasi dengan hadirnya teknologi, kecuali dengan perubahan dari dalam diri manusia yang bersangkutan.

Sekat-sekat itu juga masih dirasakan dalam tata kelola pemerintahan. Antara satu satuan kerja dengan satuan kerja yang lain. Antara satu daerah dengan daerah lain. Antara satu otoritas dengan otoritas lain. Masing-masing mendalilkan otonomi. Tantangan industri baru generasi keempat bukan semata pada penguasaan alat-alat produksi berteknologi mutakhir, melainkan pada kemampuan mengelola sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dan sinergi dengan sumber daya yang lain. Begitu pula, tantangan pembangunan tidak bisa dihadapi dengan mengedepankan ego-otonomi, melainkan kepiawaian dalam membangun sinergi dan kolaborasi antarotoritas untuk saling mendukung dan maju bersama-sama.

Begitulan konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ini diarahkan. Pendekatan aglomerasi yang digunakan dalam pengembangan SIDa

Provinsi Lampung ini berangkat dari semangat Lampung adalah 15 kabupaten dan kota. Karena itu, pembangunan Lampung adalah pembangunan ke-15 kabupaten dan kota tersebut. Bukan dengan penjumlahan, melainkan dengan kebersamaan, yang dengannya akan melahirkan kekuatan sinergi dan manfaat yang lebih optimal bagi daerah dan masyarakat secara luas.

Pada saat pemutakhiran peta jalan SIDA Provinsi Lampung ini dilakukan (2018), bertepatan dengan masa transisi pemerintahan pasca-Pilkada 2018, di mana sudah terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Meski, pelantikannya baru akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Konsekuensinya, kepemimpinan baru tentu membawa visi, misi, dan program pembangunan yang berbeda, yang akan menjadi arah pembangunan lima tahun selanjutnya. Pada saat yang sama, Bappeda Provinsi Lampung juga sedang menerjemahkan visi, misi, program baru tersebut dalam dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Dalam kondisi transisi itulah pemutakhiran peta jalan SIDA Provinsi Lampung ini disusun. Hal tersebut tentu memengaruhi rincian substansi dokumen ini, meski secara garis besar arah penguatan SIDA tetap dapat disusun dengan kadidah yang benar.

Oleh karena itu, peta jalan penguatan SIDA ini masih terbuka untuk dikaji dan disempurnakan, sesuai dengan arah pembangunan Provinsi Lampung periode lima tahun kedepan. Tim penyusun tentu sangat mengharapkan adanya saran dan masukan untuk penyempurnaan buku ini.

Bandar Lampung, Desember 2018

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR GUBERNUR LAMPUNG	i
KATA PENGANTAR KEPALA BALITBANGDA	iii
TITIK TRANSISI	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Daerah	1
Perekonomian	4
Sarana dan Prasarana	6
1.2. PDRB Provinsi Lampung	10
1.3. Sistem Inovasi Daerah	19
1.4. Dasar Hukum	20
1.5. Kerangka Pemikiran	22
BAB II KONDISI SIDa SAAT INI	24
2.1. SIDa Provinsi Lampung	24
2.2. Potensi Pengembangan Wilayah	41
2.3. Kondisi SIDa Saat Ini	48
Pertanian	49
Peternakan	54
Pariwisata	58
Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek	62
Kolaborasi Inovasi dan Difusi Teknologi	64
Budaya Inovasi	65
Klaster Industri	66
Zonasi Kawasan SIDa	67
Pilar Penguatan SIDa	68

BAB III KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI	77
3.1 Arah Kebijakan Daerah	77
3.2 Visi dan Misi	82
3.3 Tahapan dan Prioritas	88
RPJM Kesatu (2005-2009)	89
RPJM Kedua (2010-2014).....	90
RPJM Ketiga (2015-2019).....	91
RPJM Keempat (2020-2024).....	92
3.4. Kondisi SIDA yang Akan Dicapai	95
BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa	112
4.1. Strategi Penguatan SIDA	112
4.2. Arah Kebijakan Penguatan SIDA	113
BAB V FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SIDa	120
5.1. Fokus Penguatan SIDA	120
5.2. Program Prioritas Penguatan SIDA	123
BAB VI RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA	125
6.1. Sinergi Potensi Daerah	125
6.2. Rencana Aksi	131



BAB I



PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Daerah

Provinsi Lampung lahir pada 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang menetapkan Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Tanjungkarang-Telukbetung. Sebelum itu, Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak 17 Juni 1983.

Sebelum 18 Maret 1964, Provinsi Lampung secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun sejak jauh sebelum Indonesia merdeka, daerah ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat potensial, sehingga menarik kedatangan bangsa-bangsa lain untuk mengambil kekayaan alam dari bumi pertiwi. Di

daerah ini, Belanda melalui organisasi dagang VOC berhasil mengembangkan perkebunan kopi, lada, tembakau, karet, kelapa sawit, dan lainnya. Pada sekitar 1913, Belanda membangun jalan kereta api dari Telukbetung menuju Palembang untuk kepentingan mengangkut hasil-hasil perkebunan dan batu bara.

Provinsi Lampung yang luasnya tercatat 35.288,35 km² merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 300-500 meter diatas permukaan laut. Terletak pada posisi 103° 40' sampai 105° 50' Bujur Timur, dan antara 6° 45' sampai 3° 45' Lintang Selatan. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur dengan Laut Jawa. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Lanskap alam Lampung sangat indah. Di sebelah Barat dan Selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengahnya merupakan dataran rendah. Sedangkan dekat pantai di sebelah Timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke Utara, merupakan perairan yang luas. Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung—yang merupakan gabungan dari kota kembar Tangjungkarang dan Telukbetung—memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan dan alam yang besar.

Sejak akhir 2013, wilayah administrasi Provinsi Lampung terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan 2 kota, dengan luas sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Jml. Kec	Jml. Desa/ kel	Luas Wilayah (km ²)
1	Lampung Barat	Liwa	15	131	2.142,78
2	Lampung Selatan	Kalianda	17	256	700,32
3	Lampung Tengah	Gunung Sugih	28	301	3.802,68
4	Lampung Timur	Sukadana	24	264	5.325,03
5	Lampung Utara	Kotabumi	23	232	2.725,87
6	Mesuji	Mesuji	7	105	2.184,00
7	Pesawaran	Gedong Tataan	11	144	2.243,51
8	Pesisir Barat	Krui	11	116	2.907,23
9	Pringsewu	Pringsewu	9	126	624,00
10	Tanggamus	Kota Agung	20	299	3.020,64
11	Tulang Bawang	Menggala	15	147	3.466,32
12	Tulang Bawang Barat	Tulang BawangTengah	8	93	1.201,00
13	Way Kanan	Blambangan Umpu	14	221	3.921,63
14	Kota Bandar Lampung	Bandar Lampung	20	126	296,00
15	Kota Metro	Metro	5	22	61,79

Berdasarkan topografi, wilayah Lampung dapat dibagi menjadi daerah topografis berbukit sampai bergunung, berombak sampai bergelombang, dataran alluvial, dataran rawa pasang surut, dan daerah river basin. Jarak antara ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jarak Ibu Kota Provinsi dengan Kabupaten/Kota

No	Ibu Kota Provinsi	Kota/Kabupaten	Jarak (km)
1	Bandar Lampung	Liwa	241,42
2	Bandar Lampung	Kota Agung	80,78
3	Bandar Lampung	Kalianda	59,22
4	Bandar Lampung	Sukadana	80,24
5	Bandar Lampung	Gunung Sugih	57,85
6	Bandar Lampung	Kotabumi	115,19
7	Bandar Lampung	Blambangan Umpu	209,32
8	Bandar Lampung	Menggala	119,36
9	Bandar Lampung	Gedong Tataan	25,98
10	Bandar Lampung	Pringsewu	41,40
11	Bandar Lampung	Mesuji	204,34
12	Bandar Lampung	Panaragan	139,60
13	Bandar Lampung	Krui	231
14	Bandar Lampung	Bandar Lampung	0
15	Bandar Lampung	Metro	51,81

Perekonomian

Masyarakat yang tinggal di wilayah Pesisir Lampung kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan bercocok tanam. Sedangkan masyarakat yang hidup di tengah kebanyakan berkebun lada, kopi, singkong, kayu manis, dan lain-lain. Sektor ekonomi Lampung ditopang secara dominan oleh pengembangan lahan perkebunan besar, seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu, dan lainnya. Sedang di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, yang hasilnya telah merambah ke pasar nasional dan internasional. Selain hasil bumi, Lampung juga merupakan kota pelabuhan, karena Lampung merupakan pintu gerbang penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dari hasil bumi yang melimpah

tersebut tumbuh banyak industri-industri seperti di daerah pesisir Panjang, Natar, Tanjungbintang, Bandar Jaya, dan lain-lain.

Hasil Sensus Ekonomi 2016 Provinsi Lampung menunjukkan, jumlah usaha atau perusahaan di provinsi ini tercatat sebanyak 783.286 usaha/perusahaan. Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi aktivitas ekonomi dengan proporsi sekitar 99,02 persen. Sementara, Usaha Menengah Besar (UMB) sebanyak 7.679 perusahaan.

Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor merupakan aktivitas ekonomi yang paling banyak berjalan di Provinsi Lampung (57,46 persen), dimana 42,72 persen tenaga kerja pada usaha nonpertanian di Lampung bekerja pada sektor ini. Penyediaan akomodasi dan makan minum (12,12 persen), serta industri pengolahan (11,40 persen) merupakan aktivitas ekonomi terbesar kedua dan ketiga yang ada di Provinsi Lampung. Mayoritas (99,15 persen) usaha di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tersebut berskala mikro dan kecil. Pada sektor industri pengolahan, potretnya pun serupa: 99,39 persen adalah usaha mikro kecil, dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 66,68 persen.

Ketiga sektor usaha tersebut merupakan tempat mata pencaharian tiga per lima (993.490 tenaga kerja) dari total tenaga kerja di Lampung yang sebesar 1.655.816 orang. Pada usaha berskala menengah besar, tenaga kerja yang berkontribusi menghasilkan barang dan jasa hanya 13,61 persen. Dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil tidak hanya menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk secara nasional, tetapi juga merupakan ladang aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung.

Dengan struktur perekonomian Provinsi Lampung yang masih didominasi tiga sektor utama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar dan eceran, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja sektor-sektor lain sehingga

mampu memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perkembangan perekonomian daerah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis untuk dikembangkan di Provinsi Lampung dengan potensi yang besar, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pengembangan sektor pariwisata ini dipercaya bisa memberikan multi dampak yang positif bagi perekonomian daerah secara luas.

Sarana dan Prasarana

Aksesibilitas jalan ke Provinsi Lampung, dari arah Aceh dapat menggunakan jalur darat melalui jalan Lintas Tengah Sumatera, jalan Lintas Timur Sumatera, jalan Lintas Barat Sumatera, dan jalan Lintas Pantai Timur Sumatera. Sampai saat ini sedang dibangun (dalam proses) jalan tol Bakauheni - Bandar Lampung - Terbanggi Besar, yang telah dimulai pengerjaannya sejak 30 April 2015 lalu. Dari Bakauheni (Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Lampung Tengah) sepanjang 139 kilometer yang direncanakan segera beroperasi penuh.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah mempersiapkan pembangunan jaringan jalan tol dari Bakauheni sampai Palembang. Jalan tol ini, nantinya akan terdiri dari tiga kawasan ruas tol. Untuk tahun ini yang akan dibangun salah satunya Bakauheni - Terbanggi Besar dengan panjang 139 km. Selain itu, modernisasi dermaga Merak dan Bakauheni juga akan dibangun. Kawasan ruas tol Bakauheni - Terbanggi Besar diperkirakan dapat diselesaikan dalam empat tahun dengan pendanaan dari gabungan swasta dan pemerintah. Adapun biaya pembangunan ini, diprediksi mencapai Rp 53 triliun, termasuk pembebasan lahan dan konstruksi sekira Rp30 triliun.



Salah satu ruas tol Bakauheni – Terbanggi Besar

Lampung memiliki satu terminal induk yaitu Terminal Rajabasa yang terbesar di Sumatera, yang saat ini kewenangan pengelolannya ada pada pemerintah pusat. Selain terdapat terminal Sukaraja yang berada di Bandar Lampung. Terminal Rajabasa melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh (AKAP) yang melayani rute dari dan ke kota-kota di Sumatera dan Jawa. Terminal Rajabasa sudah direnovasi, tetapi pengelolaan dan pemanfaatan terkesan belum optimal dengan masih beroperasinya banyak bus antar kota di luar terminal atau terminal bayangan yang cenderung mengganggu lalu lintas setempat.

Di provinsi ini terdapat Pelabuhan Panjang yang merupakan pelabuhan ekspor-impor bagi Lampung dan juga Pelabuhan Srengsem yang menjadi pelabuhan lalu lintas distribusi batu bara dari Sumatera Selatan ke Jawa. Sekitar 92 kilometer dari selatan Bandar Lampung, ada Bakauheni, yang merupakan kota pelabuhan di Provinsi Lampung. Tepatnya di ujung selatan Pulau Sumatera. Terletak di ujung Selatan dari jalan raya Lintas Sumatera, pelabuhan Bakauheni menghubungkan Pulau Sumatera dengan Jawa via perhubungan laut.

Ratusan trip feri penyeberangan dengan 24 buah kapal feri dari beberapa operator berlayar mengarungi Selat Sunda menghubungkan Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan dengan Pelabuhan Merak di Provinsi Banten. Feri-feri penyeberangan ini terutama melayani jasa penyeberangan angkutan darat seperti bus penumpang, truk angkutan barang, juga mobil pribadi. Rata-rata durasi perjalanan yang diperlukan antara Bakauheni – Merak atau sebaliknya dengan feri ini sekitar 2 jam. Jalur udara, dapat ditempuh dari Provinsi Lampung melalui Bandar Udara Radin Inten II yang menghubungkan daerah ini dengan kota-kota besar di Indonesia dan telah dicanangkan Presiden Joko Widodo menjadi bandar bertaraf internasional.

Provinsi Lampung juga mempunyai jalur kereta api antara Bandar Lampung – Palembang, merupakan bagian dari jaringan jalur kereta api di Sumatera Bagian Selatan yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Sumatera Selatan yang berkedudukan di Palembang. Jalur kereta api dengan 40 stasiun di sepanjang 387,872 km terbentang antara Stasiun Tanjungkarang (+96) di Kota Bandar Lampung sampai Stasiun Kertapati (+2) di Palembang.

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Sumatera. Dalam skala nasional, Pulau Sumatera dihuni oleh sekitar 22% penduduk Indonesia. Tanah Sumatera yang luas, subur dan kaya akan hasil alam membuat pulau ini memiliki daya tarik. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Lampung telah membagi zonasi wilayah Lampung dalam tiga zona pembangunan, yaitu Wilayah Timur dengan mandatori Kawasan Industri, Wilayah Tengah mandatori sebagai Penyangga Ketahanan Pangan, sedangkan Wilayah Barat sebagai Pengembangan Kawasan Pariwisata, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.2. berikut:

Gambar 1
Klaster Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung



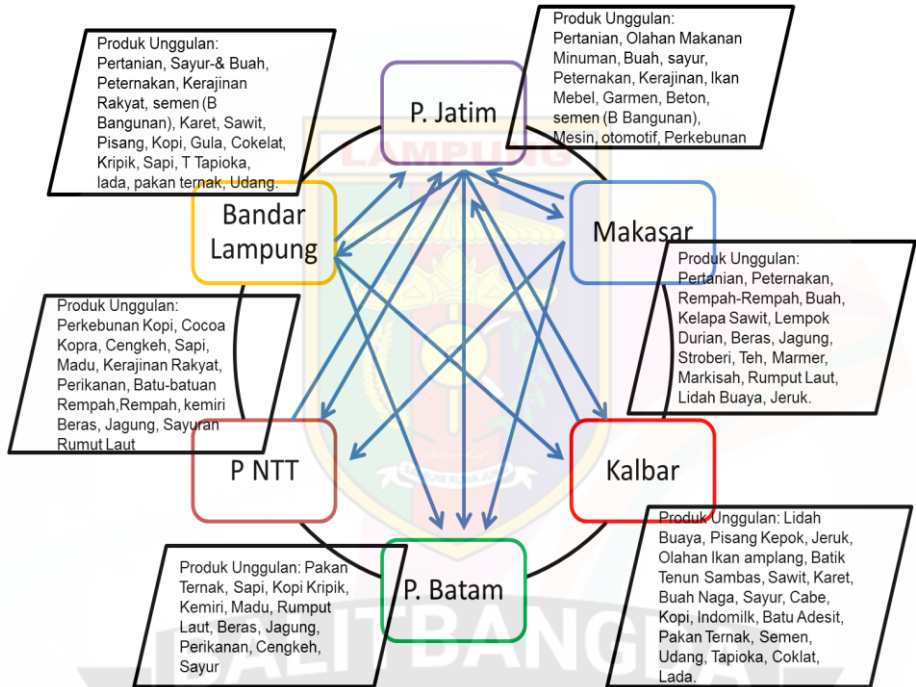
Sumber : Bappeda Provinsi Lampung

Dilihat distribusi antar-kabupaten/kota, tiga kabupaten yang wilayahnya saling berdampingan, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan tercatat sebagai daerah dengan penduduk terbanyak. Ini berarti hampir 40 persen dari total penduduk Provinsi Lampung bermukim di tiga kabupaten tersebut.

Dalam konstelasi perdagangan nasional, Provinsi Lampung juga menempati posisi strategis, baik secara geografis maupun potensi sumber daya yang tersedia. Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang dari dan ke Pulau Jawa merupakan zona perdagangan strategis antar pulau, bersama

dengan Pulau Jawa, Kalimantan, Nusatenggara Timur, dan pulau-pulau lain seperti ditunjukkan pada Gambar berikut ini:

Gambar 2. Gambaran Perdagangan Antarpulau



1.2. PDRB Provinsi Lampung

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Kontribusi terbesar PDRB Provinsi Lampung disumbang dari lapangan usaha pertanian,

kehutanan, perikanan. Disusul industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Data Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Lampung yang dirilis Bank Indonesia pada Agustus 2018 menunjukkan, sejalan dengan kuatnya permintaan domestik, ekonomi Lampung pada triwulan II 2018 mampu mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,35% (*year on year*). Pencapaian ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama selama empat tahun terakhir, maupun pertumbuhan ekonomi Sumatera dan Nasional yang masing-masing sebesar 4,65% dan 5,27%. Pertumbuhan ekonomi pada periode triwulan II ini juga lebih tinggi dibanding triwulan I tahun yang sama yaitu 5,10%.

Pertumbuhan ekonomi Lampung yang relatif tinggi pada triwulan II 2018 tersebut ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga yang memberikan andil sebesar 3,63% serta perbaikan net ekspor yang berasal dari pertumbuhan ekspor dengan andil 3,88% dan impor yang tidak sekuat triwulan sebelumnya dengan andil 5,12%. Di samping itu, pertumbuhan investasi pada triwulan II juga mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 2,47%. Konsumsi rumah tangga di Lampung didominasi oleh konsumsi makanan dan minuman selain restoran dengan pangsa sebesar 55,45%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 52,86%, diikuti konsumsi transportasi dan komunikasi sebesar 19,11% serta konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 9,86%.

Investasi di Provinsi Lampung pada triwulan II 2018 didominasi oleh investasi bangunan sebesar 65%, disusul investasi nonbangunan sebesar 35%. Lebih rendahnya capaian investasi pada triwulan II ini terutama dipengaruhi menurunnya pertumbuhan investasi nonbangunan sebesar 3,25% (*yoy*), dibanding periode sebelumnya yang mampu tumbuh sampai dengan 21,38%. Hal ini antara lain dipengaruhi

oleh sikap pelaku usaha yang cenderung *wait and see* menjelang berlangsungnya Pilkada serentak di triwulan II, disamping berlangsungnya libur panjang yang mengurangi aktivitas industri pengolahan.

Pada sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Lampung yang tinggi pada triwulan II 2018 ini ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga serta perbaikan net ekspor, disamping investasi yang cukup solid. Di sisi penawaran, motor penggerak perekonomian Lampung bersumber dari sektor industri pengolahan, sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor.

Dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2018, komponen utama penggerak ekonomi Lampung tidak banyak mengalami perubahan dari lima tahun terakhir, di mana konsumsi rumah tangga masih mendominasi struktur ekonomi Provinsi Lampung dengan pangsa sebesar 59,26% yang diikuti ekspor, impor, serta Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dengan peranan masing-masing sebesar 41,23%, 41,79%, dan 31,42% dari total pengeluaran ekonomi Provinsi Lampung.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Lampung triwulan III 2018 diperkirakan akan ditopang oleh lapangan usaha pertanian sejalan dengan siklus produksi komoditas perkebunan (kopi robusta, buah-buahan, dan tebu) yang lebih tinggi pada triwulan III 2018. Sektor industri pengolahan diperkirakan juga akan tetap tumbuh solid sejalan dengan kuatnya permintaan domestik. Pada sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, pertumbuhan diperkirakan akan sedikit lebih lambat seiring dengan berakhirnya hari-hari besar, libur sekolah, dan Pilkada serentak yang mendorong kembali normalnya permintaan.

Analisis PDRB sisi penawaran, motor penggerak perekonomian Lampung pada triwulan II 2018 masih bersumber dari sektor industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran serta

reparasi mobil dan sepeda motor. Hal tersebut ditunjukkan dari sumber pertumbuhannya di mana tiga sektor utama tersebut menjadi sektor penyumbang ekonomi terbesar pada triwulan II 2018. Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan II 2018 dengan sumbangan sebesar 1,34%. Selanjutnya sektor penyumbang terbesar kedua perekonomian Lampung adalah sektor konstruksi yang kembali mampu tumbuh double digit dan bahkan lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya dengan sumbangan sebesar 1,13%. Adapun sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor memberikan andil perekonomian Lampung pada triwulan II 2018 sebesar 1,04%.

Tabel 1.3. PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah), 2013-2017

No	KABUPATEN/KOTA	2013	2014	2016	2017	2018
1.	Lampung Barat	3.677	3.882	4.088	4.293	4.509
2.	Tanggamus	7.976	8.446	8.910	9.372	9.861
3.	Lampung Selatan	22.114	23.397	24.655	25.943	27.360
4.	Lampung Timur	23.378	24.049	25.151	26.214	27.430
5.	Lampung Tengah	34.816	36.794	38.774	40.949	43.117
6.	Lampung Utara	12.066	12.765	13.459	14.146	14.883
7.	Way Kanan	7.041	7.440	7.832	8.234	8.655
8.	Tulang Bawang	11.559	12.199	12.812	13.505	14.242
9.	Pesawaran	8.448	8.920	9.369	9.843	10.345
10.	Pringsewu	5.713	6.041	6.357	6.677	7.011
11.	Mesuji	5.140	5.432	5.716	6.008	6.321
12.	Tulang Bawang Barat	5.732	6.047	6.370	6.706	7.084
13.	Pesisir Barat	2.286	2.402	2.521	2.655	2.797
14.	Kota Bandar Lampung	27.124	29.036	30.874	32.859	34.922
15.	Kota Metro	3.074	3.262	3.454	3.658	3.865
Jumlah Kabupaten/Kota		180.142	190.114	200.342	211.062	222.400
Provinsi Lampung		180.620	189.797	199.537	209.814	220.657

Sumber: BPS, 2018

Prospek ekonomi daerah, regional, dan nasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ekonomi global. Pemberlakuan *The ASEAN Community* pada 2015 lalu, misalnya, tentu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi tumbuhnya perekonomian daerah dan nasional. Hal tersebut tentu menuntut daya saing yang lebih tinggi. Hasil pendaftaran usaha/perusahaan dalam Sensus Ekonomi 2016 Provinsi Lampung menunjukkan, jumlah usaha/perusahaan di provinsi ini tercatat sebanyak 783.286 usaha/perusahaan. Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi aktivitas ekonomi dengan proporsi sekitar 99,02 persen. Sementara, Usaha Menengah Besar (UMB) sebanyak 7.679 perusahaan.

Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor merupakan aktivitas ekonomi yang paling banyak berjalan di Provinsi Lampung (57,46 persen), dimana 42,72 persen tenaga kerja pada usaha nonpertanian di Lampung bekerja pada sektor ini. Penyediaan akomodasi dan makan minum (12,12 persen), serta industri pengolahan (11,40 persen) merupakan aktivitas ekonomi terbesar kedua dan ketiga yang ada di Provinsi Lampung. Mayoritas (99,15 persen) usaha di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tersebut berskala mikro dan kecil. Pada sektor industri pengolahan potretnya pun serupa: 99,39 persen adalah usaha mikro kecil, dengan jumlah serapan tenaga kerja mencapai 66,68 persen.

Ketiga sektor usaha tersebut merupakan tempat mata pencaharian tiga per lima (993.490 tenaga kerja) dari total tenaga kerja di Lampung yang sebesar 1.655.816 orang. Pada usaha berskala menengah besar, tenaga kerja yang berkontribusi menghasilkan barang dan jasa hanya 13,61 persen. Dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil tidak hanya menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk secara nasional, tetapi juga merupakan ladang aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis untuk dikembangkan baik dalam skala daerah maupun nasional. Pengembangan sektor pariwisata ini dipercaya bisa memberikan multi dampak yang positif bagi perekonomian daerah secara luas. Dalam kaitan tersebut, PDRB yang berkaitan dengan pariwisata yaitu sektor akomodasi, makan minum, dan jasa lainnya juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Lampung penting untuk dimantapkan dengan dukungan peningkatan infrastruktur seperti ketersediaan transportasi massal yang layak, dan pengelolaan promosi yang berskala internasional.

Dari aspek sumber daya alam (SDA), Provinsi Lampung termasuk wilayah yang potensial. Potensi SDA yang ada di Provinsi Lampung meliputi lahan, hutan, plasma nutfah (flora dan fauna), perairan, pesisir/pantai, kelautan, bahan tambang, dan lain-lain. Berdasarkan peta geologi, potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi minyak bumi, energi geotermal, batu bara, emas, perak, bijih besi, uranium, marmar, zeolit, dolomit, pasir, dan lain-lain. Sumber daya alam tersebut menjadi modal penting untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang akan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam tersebut harus dilakukan melalui inovasi dan teknologi. Inovasi akan mendorong peningkatan nilai tambah, sehingga sumber daya alam dapat memberikan manfaat optimal dan menghasilkan produk-produk hilir yang bernilai lebih tinggi.

Upaya pengembangan komoditas strategis atau unggulan di Provinsi Lampung terus diupayakan, terutama melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta daya kreatif masyarakat. Upaya pengembangan komoditas tidak hanya peningkatan produksi komoditi primer, tetapi juga pengembangan produk-produk hilir yang bernilai tambah tinggi. Pada saat ini, beberapa komoditas strategis Lampung

telah berhasil penempati posisi teratas, baik pada tingkat regional Sumatera atau tingkat nasional.

Tabel 1.5. menggambarkan komoditas strategis di Provinsi Lampung. Penting dicermati bahwa posisi tersebut masih lebih dicerminkan faktor kuantitas, belum didukung faktor kualitas, daya saing, maupun nilai tambah. Sebagian besar produk komoditas daerah yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk produk primer yang bernilai tambah rendah. Seharusnya perlu terus menerus diupayakan pengembangan proses hilir untuk mengolah bahan baku menjadi produk industri turunan yang bernilai tambah tinggi.

Tabel 1.5.
Komoditas Unggulan Provinsi Lampung 2017

Komoditas	Luas Areal	Produksi	Posisi	
			Sumatera	Nasional
Ubi Kayu	247.838	4.535.552	Ke-1	Ke-1
Karet	67.771	42.117	Ke-8	Ke-10
Kopi	126.888	117.016	Ke-2	Ke-2
Sawit	79.338	158.115	Ke-8	Ke-11
Coklat	23.224	12.447	Ke-4	Ke-8
Kelapa	88.021	81.256	Ke-3	Ke-7
Tebu	12.002	75.124	Ke-1	Ke-1
Lada	54.503	20.854	Ke-1	Ke-2

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Lampung 2018 (*diolah*).

Potensi alam yang besar yang dimiliki daerah ini masih menyisakan permasalahan yang belum kunjung dapat dituntaskan, yaitu masih banyaknya kemiskinan yang tersebar di hampir semua kabupaten dan kota dengan persentase yang berbeda-beda. Pada 2017, persentase penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Lampung Utara (21,55%), disusul Pesawaran (16,48%) dan Lampung Timur (16,35%).

Secara total, presentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada 2017 adalah sebesar 13,69%.

Sementara, angka kemiskinan Lampung dari penghitungan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016 mencapai 14,29 persen. Dibandingkan kondisi semester sebelumnya (September 2015) angka kemiskinan Lampung mengalami kenaikan 0,76 poin atau dari 13,53 persen. Sejalan dengan kenaikan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2016 juga bertambah 68,9 ribu jiwa, menjadi 1,101 juta jiwa, dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 sebesar 1,170 juta jiwa.

Perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan, dimana 15,69 persen penduduknya berkategori miskin. Angka ini setara dengan 936,21 ribu jiwa. Sedangkan di perkotaan, penduduk miskinnya sebanyak 10,53 persen atau 233,39 ribu jiwa. Selama periode September 2015 hingga Maret 2016, baik perkotaan maupun perdesaan mengalami kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin. Di daerah perkotaan bertambah sekitar 35,4 ribu jiwa (13,77 persen), sementara di daerah perdesaan bertambah 33,5 ribu jiwa (4,28 persen).



Presentasi penduduk miskin di Provinsi Lampung menurut Kabupaten dan Kota selama kurun waktu 2012 – 2017 ditampilkan dalam Tabel 1.6. di bawah ini :

Tabel 1.6.
Persentase Penduduk Miskin 2012 – 2017

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	15,13	13,96	13,70	14,18	15,06	14,32
Tanggamus	16,10	15,24	14,95	14,26	14,05	13,25
Lampung Selatan	18,19	17,09	16,77	16,27	16,16	15,16
Lampung Timur	18,59	17,38	17,05	16,91	16,98	16,35
Lampung Tengah	14,96	13,37	13,13	13,30	13,28	12,90
Lampung Utara	25,16	23,67	23,32	23,20	22,92	21,55
Way Kanan	16,54	15,36	15,03	14,61	14,58	14,06
Tulangbawang	9,43	8,04	8,66	10,25	10,20	10,09
Pesawaran	18,01	17,86	17,51	17,61	17,31	16,48
Pringsewu	11,01	9,81	9,83	11,80	11,73	11,30
Mesuji	7,69	5,81	6,57	8,20	8,00	7,66
Tulang Bawang Barat	6,73	6,31	7,12	8,23	8,40	8,11
Pesisir Barat	-	-	-	15,81	15,91	15,61
Bandarlampung	12,65	10,85	10,60	10,33	10,15	9,94
Metro	12,09	11,08	10,82	10,29	10,15	9,89
Lampung	15,65	14,39	14,21	14,35	14,29	13,69

Sumber: BPS, 2017

Permasalahan lingkungan dan penataan ruang juga masih perlu menjadi perhatian, sebagaimana juga provinsi lain. Pembangunan berkelanjutan masih belum mampu diterjemahkan secara utuh dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Konsep pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya dimaknai dan terpusan pada isu-isu lingkungan, melainkan lebih luas, mencakup lingkup kebijakan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.

Tujuan penataan ruang adalah untuk pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung. Terdapat disparitas pembangunan antara pusat kota

khususnya Bandar Lampung dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Indikasi disparitas pembangunan di Provinsi Lampung dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, di mana masih terdapat kabupaten yang laju pertumbuhan PDRB nya di bawah dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi. Dengan kata lain, ketiga dimensi tersebut saling terkait dan merupakan penopang pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, tetapi juga pembangunan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

1.3. Sistem Inovasi Daerah

Ketentuan rinci tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tercantum dalam Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Disebutkan didalam peraturan bersama tersebut, bahwa Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Ruang lingkup penguatan SIDa sesuai peraturan tersebut meliputi kebijakan penguatan SIDa, penataan unsur SIDa, dan pengembangan SIDa. Dalam konteks provinsi, gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Adapun kebijakan penguatan SIDa dimaksud, disusun oleh Tim Koordinasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang beranggotakan unsur pemerintah dan lembaga/organisasi terkait.

Kebijakan penguatan SIDA tercantum dalam rencana strategis lima tahunan daerah, yaitu dalam *Roadmap* Penguatan SIDA, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). *Roadmap* Penguatan SIDA sendiri memuat kondisi SIDA saat ini, tantangan dan peluang, kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan dan strategi penguatan, fokus dan program prioritas, serta rencana aksi penguatan SIDA. Pada intinya, *Roadmap* Penguatan SIDA mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, serta Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, adalah lembaga yang mengemban tugas kelitbang di Provinsi Lampung. Dalam kerangka penguatan SIDA tersebut, Balitbangda telah menyusun *Roadmap* SIDA pada 2016. Dalam dinamika penerapannya, muncul kebutuhan untuk peninjauan kembali dokumen tersebut dalam rangka penyempurnaan dan pemutakhiran. Atas dasar inilah kemudian dilakukan revisi terhadap *Roadmap SIDA* Provinsi Lampung sebelumnya.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 5.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang RPJPN 2005 - 2025.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005 - 2025.
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang/Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019.

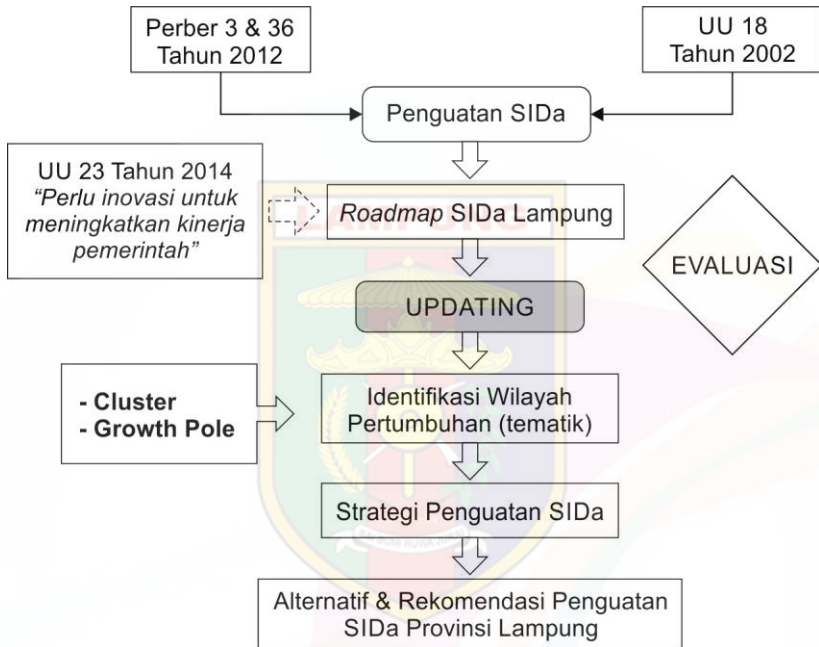
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
15. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (**Gambar 1.3.**) dalam penyusunan updating Roadmap Penguatan SIDA Provinsi Lampung ini terbangun dari substansi Roadmap SIDA Provinsi Lampung yang telah disusun sebelumnya (2017), yang hanya memuat pengembangan dan hilirisasi ubi kaju sebagai komoditi unggulan Lampung, dinilai kurang relevan terhadap peran dan posisi Provinsi Lampung dalam pengembangan sistem inovasi daerah. Fokus pengembangan dan hilirisasi ubi kayu pada Roadmap SIDA Provinsi Lampung tersebut membuat peran provinsi dalam penguatan SIDA menjadi begitu sempit.

Sementara, Peraturan Bersama Mendagri dan Menristek menjelaskan tugas provinsi dalam kerangka SIDA adalah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan penguatan SIDA di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, yang meliputi identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDA, analisis potensi sinergi kebijakan, dan memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDA.

Karena itulah revisi terhadap Roadmap SIDA yang ada tersebut menjadi penting untuk dilakukan.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Updating SIDA Prov. Lampung



BAB II



KONDISI SIDa SAAT INI

2.1. SIDa Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan wilayah yang terletak paling ujung Selatan Pulau Sumatera. Secara geografis memiliki kedudukan yang sangat strategis. Dekat dengan Ibu Kota Jakarta dan terkoneksi dengan pusat-pusat bisnis di Pulau Jawa. Selama ini Provinsi Lampung banyak berperan sebagai pemasok hasil produksi sektor pertanian ke pulau-pulau lain yang ada di Indonesia, diantaranya ke Pulau Batam, Kalimantan, Sulawesi, dan tentunya ke Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Kutub pertumbuhan yang selama ini menjadi penggerak perekonomian Provinsi Lampung, terutama bagian selatan provinsi ini adalah Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pasawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, yang didukung oleh kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Lampung.

Potensi yang dimiliki Provinsi Lampung harus dapat dikelola secara terpadu dalam suatu agenda pembangunan yang terintegrasi, dengan prinsip aglomerasi ekonomi, untuk mengakomodir potensi dari berbagai sektor pembangunan di berbagai daerah, sehingga pembangunan lebih tepat sasaran serta optimal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sistem

Inovasi Daerah (SIDa) menawarkan kerangka konsep pembangunan yang terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan. SIDa merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang sistematis dan terintegrasi. Melalui peta jalan (*roadmap*) yang bersifat multidimensional dalam suatu sistem yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah nasional dan daerah.

Penguatan SIDa telah berkembang di Indonesia sampai pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sejak diberlakukannya Peraturan Bersama Kemenristek Dikti No.3 dan Kemendagri No.36 Tahun 2012. Peraturan Bersama tersebut secara substansi merupakan kerangka kebijakan pembangunan yang sistematis, sinergis, dan menganut prinsip keintegrasian antarsektor dalam rangka mengoptimalkan potensi unggulan daerah, aglomerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing antar daerah, juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antaraktor pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan dalam implementasi SIDa. Sistem inovasi daerah ini merupakan subsistem Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang memfasilitasi proses interaksi hirarkhi pusat dan daerah, serta interaksi diantara komponen penguatan sistem inovasi yang relevan dalam konteks pembangunan dalam era reformasi dan otonomi daerah saat ini.

Dasar pijakan yang lain, sesuai agenda nasional dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan bahwa setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa. Diantaranya adalah membentuk tim koordinasi dan menyusun Roadmap Penguatan SIDa. Selain itu, penataan SIDa baik dalam aspek kelembagaan maupun

sumber daya SIDA, mengembangkan SIDA melalui basis potensi ekonomi lokal dan sosial budaya, serta melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat.

Provinsi Lampung sebagai bagian dari entitas pengembangan sistem inovasi nasional dituntut kesiapannya untuk terlibat aktif mengembangkan sistem inovasi di daerah sebagai upaya meningkatkan daya saing. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi menjadi penting dilakukan dalam penyusunan kerangka kerja strategis yang hendak dituangkan dalam bentuk *roadmap*. Penyusunan *roadmap* harus bersifat *bottom up* untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan potensial yang akan dipecahkan, sekaligus dikombinasikan dengan pendekatan *top down* terkait dengan hasil-hasil kajian dan pemikiran para pakar, akademisi, peneliti, serta praktisi yang nantinya menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan.

Kendala yang sering muncul dalam implementasi sistem inovasi pembangunan melalui SIDA ini adalah, masih sering terjadi dalam penyusunan program-program pembangunan yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) selama ini, umumnya masih mencerminkan program yang bersifat rutinitas, sporadis, dan parsial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Dampaknya, egosektoral masing-masing SKPD mengedepan dalam penyusunan program dan kegiatan. Belum terbangun semangat dan arah inovasi secara merata, sinergis, dan terintegrasi. Masing-masing SKPD condong ingin menunjukkan kinerja organisasinya masing-masing dan lebih berorientasi pada hirarki struktural. Belum ada kerangka konsep yang mampu mengarahkan kerja kolaboratif dalam suatu sistem dan aspek hilirisasi dan aglomerasi pembangunan.

Implementasi penguatan SIDA pun belum seragam di semua daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagian memiliki cara

pandang bahwa SIDA hanya berfokus pada kluster industri. Bahkan ada yang memandang SIDA sebatas produk berupa komoditi unggulan tertentu dalam kawasan tertentu atau *one vilage one product*. Paradigma SIDA yang dibangun dalam *roadmap* lain adalah, sistem yang mencakup hierarki antarsektor yang mampu berkolaborasi secara terintegrasi dalam kerangka konsep pembangunan yang memenuhi asumsi hilirisasi, aglomerasi, multidimensional, berkelanjutan, serta berdaya saing. Karena itu, cara pandang terhadap *Roadmap* Penguatan SIDA ini bersifat multi dimensional, melalui pemetaan zonasi ekonomi, sains dan teknologi, sosial budaya, terintegrasi dengan kawasan strategis dan pariwisata, serta penempatan ruang publik kreatif yang tepat sasaran sesuai dengan karakteristik potensi kewilayahan dan tersistem, sehingga diharapkan dapat menjamin terjadinya sistem hilirisasi kluster industri yang akan diangkat dalam SIDA.



Perkebunan kopi kabupaten Lampung Barat

Pada tataran implementasi, sesuai dengan Peraturan Bersama tentang SIDA mengamanatkan bahwa setiap daerah menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kebijakan penguatan sistem

inovasi daerah tersebut harus tertuang dalam sebuah dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah, yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Peta jalan ini merupakan salah satu dokumen perencanaan berorientasi masa depan atau *foresight* yang merupakan perencanaan dinamis. Dengan perencanaan ini, diharapkan mampu mengantisipasi atau mengelola perubahan. *Foresight* melibatkan proses identifikasi masa depan yang diinginkan secara rasional, dan menjadikannya sebagai dasar perencanaan pada masa kini untuk mencapainya. Dengan demikian *roadmap* harus terintegrasi kedalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung.

Mengacu pada visi nasional dan dengan mendasarkan pada modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, Visi Provinsi Lampung 2005-2025 adalah: **“Lampung Maju dan Sejahtera 2025”** yang dimaksudkan bahwa Provinsi Lampung diarahkan untuk menjadi daerah yang maju dan berdaya saing tinggi. Guna mewujudkan visi tersebut, salah satu strategi kebijakan pembangunan yang saat ini sedang bergulir di berbagai provinsi dan kabupaten/kota adalah melalui implementasi SIDA. Dalam rangka mencapai SIDA yang optimal, perlu untuk mengakomodir berbagai aspek pembangunan yang multidimensional.

Langkah sebelum menentukan klaster industri dan kerangka kawasan inovatif berbasis potensi lokal, perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi kutub-kutub pertumbuhan yang akan menjadi kerangka kawasan hilirisasi klaster industri yang akan dibangun di satu wilayah. Berdasarkan kajian zonasi ekonomi, sains teknologi, dan sosial budaya, serta integrasinya dengan kerangka kawasan strategis kewilayahan dan pariwisata, dapat ditentukan kutub-kutub pertumbuhan dan potensi kewilayahan Provinsi Lampung, yaitu: sebagai kutub pertumbuhan utama yang mampu menggerakkan perekonomian daerah berada di Ibu

Kota Provinsi Lampung yaitu Bandar Lampung. Didukung kawasan Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus, serta kawasan wisata Teluk Lampung, dan Teluk Semangka. Kemudian kutub pendukung pertumbuhan adalah Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur dengan potensi kerajinan rakyat, wisata keluarga, pengolahan makanan dan minuman (kuliner), pertanian, dan perdagangan. Sedangkan kutub kedua adalah di Kabupaten Lampung Barat, dan Way Kanan, dengan potensi unggulan perkebunan berupa hasil produksi kopi, lada, sawit, tebu, karet, damar, kakao dan peternakan. Lebih jelasnya, hasil pemetaan matrik kutub pertumbuhan dan potensi kewilayahan dapat ditunjukkan pada matrik Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Matrik Kutub Pertumbuhan dan Potensi Klaster Industri

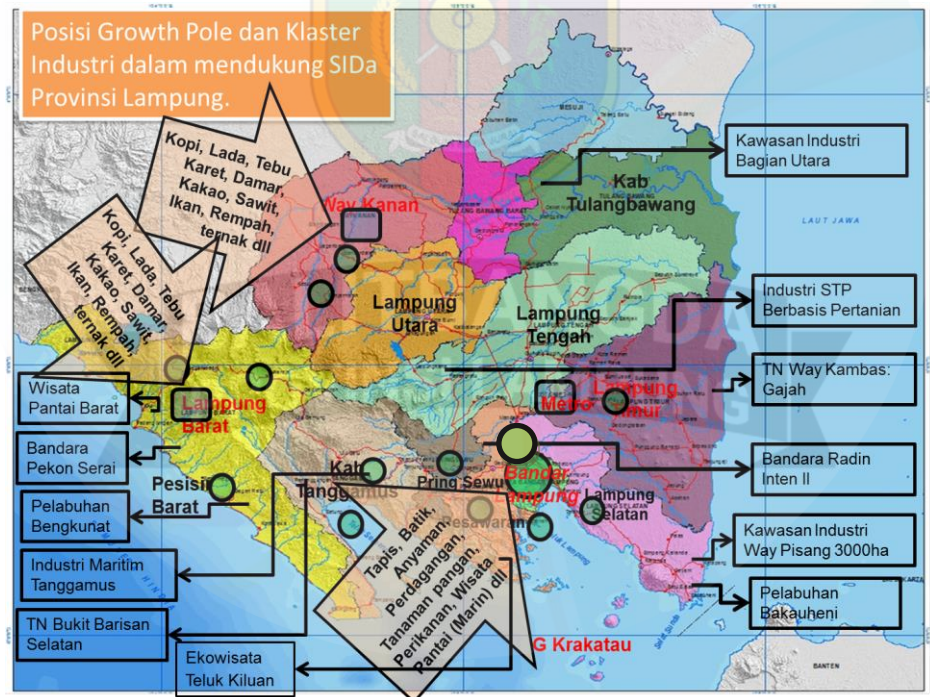
MATRIK KUTUB PERTUMBUHAN POTENSI WILAYAH	WP Provinsi Lampung bagian mana secara prioritas dapat dijadikan kawasan strategis pusat keg. ekonomi yang mampu menggerakkan perekonomian daerah?	WP Provinsi Lampung bagian mana yang paling baik kondisi infrastruktur jalan dan irigasi yang bersinggungan dengan kawasan strategis Nasional?	WP Provinsi Lampung bagian mana yang memiliki potensi unggulan yg bisa dijadikan daya tarik daerah?	WP Provinsi bagian mana yg memiliki potensi ekspor? Tuliskan jenis komoditas pada titik-titik penjelasan tambahan	WP yang memiliki posisi strategis bersinggungan kawasan strategis provinsi dan/atau Nasional dapat dijadikan transit antar daerah dan menjadi pasar hasil produksi Provinsi Lampung?	Kawasan mana yang cocok sebagai daerah pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan Negara Daerah?	Kawasan cocok untuk pengembangan pasar bagi produk UMKM termasuk kerajinan rakyat Provinsi Lampung? & sebutkan kerajinan rakyat yang diunggulkan di Kab mana?	WP yang cocok sebagai daerah pengembangan pariwisata? Dan sebutkan 3 (tiga) destinasi wisata yang diandalkan dan di Kab mana?
Wilayah Pengembangan Propinsi Lampung (Bagian Utara) mencakup Kab. Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji	4	3	6	2	5	4	0	
Wilayah Pengembangan Provinsi Lampung (Bagian Selatan) meliputi Kab. Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pring Sewu, dan Kab. Tanggamus	45	32	23	5	42	36	26	34
Wilayah Pengembangan Provinsi Lampung (Bagian Timur) meliputi Kab. Lampung Timur dan Kota Metro	1	11	0	0	2	0	0	1
Wilayah Pengembangan Provinsi Lampung (Bagian Barat) meliputi Kab. Lampung Barat, Pesisir Barat dan Way Kanan	0	0	20	26	2	13	12	16
Wilayah Pengembangan Provinsi Lampung (Bagian Tengah) meliputi Kab. Lampung Tengah dan Lampung Utara	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil zonasi ekonomi, saintek, sosbud dan integrasinya dengan kawasan strategis pariwisata, Balitbang Provinsi Lampung (2018). Mengacu Model Kohesivitas Multi Objektif Harmono (2016).

Secara lebih sederhana, kondisi kutub pertumbuhan dan potensi kluster, berdasarkan hasil pemetaan zonasi ekonomi, sosial budaya, sains teknologi, potensi keunggulan komparatif, serta integrasinya dengan kawasan strategis dan pariwisata dapat ditetapkan kutub-kutub pertumbuhan sebagai kerangka kawasan inovatif bagi implementasi SIDA Provinsi Lampung yang terintegrasi, sekaligus mampu mengoptimalkan proses hilirisasi kluster industri, untuk mencapai aglomerasi dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Secara visual, untuk dapat lebih mudah cara memahami, dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1. berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Kawasan Inovatif Bagi Implementasi SIDA yang Optimal.



Sumber: Hasil zonasi ekonomi, saintek, sosial budaya integrasinya dengan kawasan strategis dan pariwisata Balitbang Provinsi Lampung (2018). Mengacu Model Kohesivitas Multi Objektif, Harmono (2016).



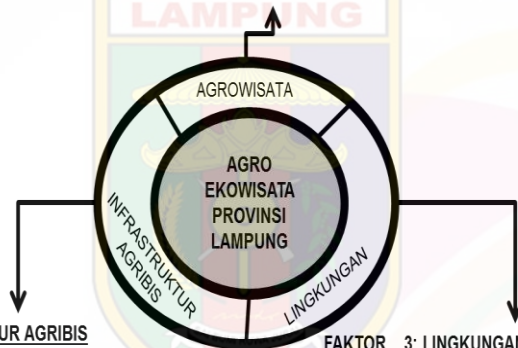
Peternakan Sapi di Lampung

Berdasarkan hasil penelitian tentang penentuan kluster industri yang mempertimbangkan berbagai aspek (multidimensional), meliputi: aspek geografi, demografi, sosial budaya kemasyarakatan, potensi unggulan, tata ruang wilayah, aspek pasar, aspek kelembagaan, dan aspek pariwisata, dapat ditentukan kluster tematik yang sesuai dengan karakteristik potensi kewilayahan dan dapat menjamin terjadinya proses hilirisasi kluster industri tematik yang diangkat dalam SIDA Provinsi Lampung, yaitu **“Agroekowisata Provinsi Lampung”** dengan kluster unggulan perkebunan, peternakan, perikanan, dan kerajinan rakyat. Uji faktor dilakukan melalui kuesioner yang melibatkan para pemangku kepentingan, seperti satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta beberapa satuan kerja di kabupaten dan kota. Sesuai hasil uji faktor yang terbentuk dapat ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Hasil analisis faktor berdasarkan berbagai aspek yang multidimensional

FAKTOR 1: AGROWISATA

- X1.4[0,724]: Kondisi fasilitas pendidikan dan kesehatan di Provinsi Lampung memadai bagi masyarakat.
- X1.6[0,754]: Luasan pertanian padi & sawah telah dipertahankan untuk ketahanan pangan didukung irigasi yg baik
- X1.7[0,689]: Penataan kawasan peternakan sapi di Provinsi Lampung telah berkembang baik dengan pengelolaan modern
- X3.3[0,848]: Masyarakat Provinsi Lampung menerima kehadiran industri jasa perhotelan dan pariwisata lainnya
- X3.4[0,758]: Masyarakat Provinsi Lampung memiliki daya juang gigih dalam mencapai keberhasilan dibidang pertanian
- X4.1[0,715]: Komunitas Gapktan sangat baik dalam mendukung pengembangan agrowisata Provinsi Lampung
- X4.3[0,785]: Budaya keramahmataman masyarakat Provinsi Lampung dalam menerima para wisatawan sangat baik
- X4.4[0,679]: Potensi Agrowisata Provinsi Lampung telah berkembang & dikenal sebagai bumi Agropolitan



FAKTOR 2: INFRASTRUKTUR AGRIBIS

- X1.3[0,546]: Pengembangan infrastruktur jalan & fasum pasar, terminal di Provinsi Lampung telah memadai.
- X5.1[0,822]: Penerimaan masyarakat terhadap masuknya para investor di Provinsi Lampung sangat kondusif
- X5.2[0,812]: Kelembagaan bank dan koperasi telah mendukung dalam membesarkan UMKM/bisnis masyarakat
- X5.6[0,601]: Keterlibatan Dinas Pariwisata, Cipta Karya dan Dinas Pertanian telah mendukung Agrowisata
- X6.3[0,795]: Industri Olahraga Mamin sudah berkembang mendukung perdagangan di Provinsi Lampung
- X6.4[0,816]: Industri peternakan sudah berkembang pesat dalam mendukung kawasan Agribisnis Peternakan

FAKTOR 3: LINGKUNGAN

- X1.10[0,732]: RTH Provinsi Lampung telah memenuhi syarat UU sebanyak 30 % dari seluruh wilayah
- X4.2[0,634]: Kepedulian masyarakat dan wisatawan dalam menjaga pelestarian lingkungan sangat baik
- X4.5[0,635]: Infrastruktur Jln menuju tanaman Agro telah dibangun memadai sebagai tujuan wisata dan memperhatikan pelestarian lingkungan
- X4.6[0,586]: Perda RTRW telah dibuat & dilaksanakan dengan baik dalam menjaga lingkungan

Sumber: *Data primer, Penentuan Zonasi Ekonomi, Saintek, Sosial Budaya Integrasinya dengan Kawasan Strategis & Pariwisata Balitbang Provinsi Lampung (2018). Mengacu Model Kohesivitas Multi Dimensional, Harmono (2016)*

Agroekowisata dapat menjadi nilai tambah lahan pertanian melalui jasa wisata dan pemasaran produk pertanian yang lebih baik (Dwiridotjahjono dkk, 2017). Agroekowisata didefinisikan sebagai suatu bentuk pariwisata yang memanfaatkan budaya petani sebagai daya tarik

wisata. Agrowisata hampir sama dengan *ecotourism*, tetapi penekanan pemanfaatannya bukan terhadap *natural landscape*. Lebih lanjut Avenzora dan Teguh (2013), seperti dikutip Dwiridotjahjono dkk, menjelaskan ekowisata tidak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga dapat meningkatkan pengetahuan pertanian pengunjungnya dan mengurangi arus urbanisasi dengan memandirikan dan memajukan perekonomian setempat terutama petani. Menurut Spillane (1994), untuk dapat mengembangkan suatu kawasan mejadi kawasan pariwisata (termasuk juga agrowisata) terdapat lima unsur yang harus dipenuhi, yaitu atraksi, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan keramahamtaman pelayanan.

Di sisi lain, tuntutan pembangunan yang mengedepankan konsep peningkatan daya saing daerah merupakan agenda penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, dibutuhkan suatu sistem inovasi pembangunan yang berjalan secara komprehensif, serta terjadinya kolaborasi antaraktor pembangunan yang merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan SIDA merupakan salah satu strategi pendekatan utama dalam penguatan inovasi nasional yang mewadai proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

Fakta yang ada saat ini banyak SIDA yang dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena paradigma yang dikembangkan dalam kerangka SIDA lebih berbasis komoditi. Seperti konsep *one-village-one-product*. Pada saat yang sama, masih kurang mempertimbangkan aspek spasial dalam kawasan-kawasannya, sehingga belum mewakili keintegrasian yang dikehendaki dalam sebuah Sistem Inovasi Daerah yang struktur organisasinya luas dan bersifat multidimensional. Secara kelembagaan, SIDA merupakan sinergi antarunsur. Penanggung jawab SIDA adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sekretaris daerah sebagai Ketua Tim Koordinasi SIDA. Kepala Bappeda sebagai wakil

ketua, unsur kelitbangan sebagai sekretaris, dinas dan badan (OPD) sebagai kelompok kerja yang akan bekerja secara sinergis dalam suatu kawasan yang memenuhi syarat berkembangnya sebuah klaster industri yang akan dibangun untuk mencapai kaidah aglomerasi dan daya saing daerah.

Bahkan konsep sains teknologi park yang mengandalkan pengembangan komoditi unggulan kawasan, dengan perlakuan fokus utamanya pada kemajuan teknologi untuk menciptakan wirausaha baru dan produk hilir baru dalam rangka mencapai daya saing daerah, pada tataran skema tertentu dapat diterima. Namun, pada aspek yang lebih luas dan multisektor pembangunan, sering kali jika budaya dan kesiapan masyarakatnya untuk berteknologi dalam kerangka kawasan hilirisasi tidak mendapat perhatian secara tepat, maka hasil yang dicapai juga tidak optimal. Selain itu, pola kerja aglomerasi kawasan juga masih kurang optimal terkait dengan aliansi kawasan strategis, pariwisata, aspek pasar, sumber bahan baku, industri terkait, serta industri pendukung sampai lembaga-lembaga pendukung yang bersifat komplementer dan multidimensional.

Pengembangan SIDA di Provinsi Lampung diorientasikan berbasis zonasi ekonomi, dengan memperhatikan daya serap teknologi di masyarakat, faktor sosial budaya dan kearifan lokal, serta potensi pariwisata dalam kerangka kawasan yang mampu mengakomodir berbagai sektor (multidimensioal), yang diharapkan menghasilkan kerangka kawasan aglomerasi ekonomi dengan menyinergikan unsur satuan kerja dan unsur masyarakat dalam implementasi konsep SIDA. Kolaborasi antara kutub-kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) di daerah dengan klaster industri, diarahkan untuk mengoptimasi berbagai aspek pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Kohesi dua pendekatan tersebut akan menghasilkan kerangka kawasan yang memenuhi syarat dan kompatibel dengan struktur SIDA yang

multisektor. Kerangka kawasan tersebut selanjutnya ditopang dengan produk/komoditi unggulan, serta lingkungan teknologi yang kondusif bagi program-program dalam kerangka tematik yang dikehendaki SIDA.

Kondisi SIDA Provinsi Lampung secara nyata terus mengalami dinamisasi, perbaikan, serta penyesuaian dengan isu-isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan daya saing daerah. Pada tingkat regional, Indonesia telah memasuki era-Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak dua tahun terakhir. Era kompetisi dan kompetensi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerja sama ekonomi antarkawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus perdagangan bebas baik barang, jasa, arus modal (investasi), serta tenaga kerja.

Dengan hadirnya era tata niaga baru tersebut, Provinsi Lampung memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi dan keunggulan untuk meningkatkan skala ekonomi daerah, sebagai basis untuk mendorong tumbuhnya perekonomian lokal, dengan menjadikannya sebagai momentum memacu peningkatan daya saing komoditi dan produk hilir daerah. Diberlakukannya MEA patut diimbangi dengan upaya-upaya terencana dan *targeted* dengan terus meningkatkan sinergitas, terutama dalam meningkatkan dukungan penataan kelembagaan birokrasi, perluasan akses infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, perubahan sikap mental, serta meningkatkan akses finansial terhadap sektor riil, yang kesemuanya bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan nasional.

Pada sisi lain, MEA akan menjadi peluang dengan berkurangnya hambatan perdagangan, bahkan menjadi tidak ada batas-batas wilayah.

Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor. Kondisi sebaliknya, manakala kita tidak siap berproduksi dan berkompetisi, maka MEA justru menjadi penghalang bagi pengembangan ekonomi Indonesia karena daya saing yang rendah. Ditinjau dari sisi investasi, dengan dukungan birokrasi pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dalam mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI). Meningkatnya investasi diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*), sekaligus mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mempertimbangkan fenomena perdagangan pada situasi global tersebut, semakin dibutuhkan strategi tersendiri secara tersistem, sinergis, dan terintegrasi dalam upaya mengoptimalkan daya saing daerah. Optimalisasi berbagai aspek pembangunan tersebut dikemas dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah. Trend pembangunan ekonomi melalui pengembangan kluster industri dalam meningkatkan daya saing daerah sudah menjadi isu secara internasional, yang harus segera direspon oleh daerah-daerah di Indonesia. Meskipun telah bermunculan berbagai Peraturan Pemerintah terkait dengan inovasi, SIDA merupakan Sistem inovasi yang tetap relevan dengan perkembangan global, sehingga laik untuk ditindaklanuti dan diperkuat sinergitasnya dengan program-program pembangunan yang lain.

Adapun program jangka panjang yang masih relevan dan sejalan dengan SIDA dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah adalah, pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Operasionalisasinya diperlukan penguatan Sistem Inovasi Daerah secara

terarah dan berkesinambungan. Seperti yang termaktub dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012, yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah tersebut harus termanifestasikan dalam *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Mengacu pada ketentuan Peraturan Bersama tersebut, dan berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka *roadmap* yang disusun diharapkan mencerminkan lima agenda kebijakan inovasi dalam bentuk indikator-indikator yang berkesesuaian, yaitu penguatan sistem inovasi yang secara kelembagaan ditunjukkan dengan terbentuk Tim Koordinasi SIDA, diperkuat dengan penetapan zonasi ekonomi sosial budaya yang dikohesikan dengan kutub-kutub pertumbuhan sebagai kawasan aglomerasi yang didukung dengan kluster industri, jaringan inovasi, teknopreneur, serta pilar-pilar tematik, yang akan mengerucut dalam serangkaian kegiatan pendampingan teknis, kajian kebijakan (*action research*), dan implementasi program-program aksi.

Dengan landasan hukum tersebut, serta dilatarbelakangi penelitian yang shopisticated terkait kondisi dan potensi kabupaten/kota, *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Lampung menetapkan kluster industri tematik yaitu Agroekowisata Provinsi Lampung. Produk unggulan yang ada di Provinsi Lampung adalah hasil perkebunan kopi, lada, karet, tebu, kakao, damar, ubi kayu, peternakan, perikanan, serta hasil-hasil kerajinan rakyat. Pengembangan agrowisata selalu menuntut pengembangan seluruh subsistem pertanian secara terintegrasi. Seluruh subsistem agrowisata terikat dalam kesatuan kawasan sehingga untuk mengembangkan agrowisata pengembangan kawasan mutlak diperlukan. Pengembangan kawasan agrowisata dapat dilaksanakan berdasarkan

interaksi subsistem yang ada, produk unggulan sebagai ciri khas penguat agrowisata dan lingkungan di sekelilingnya.

Bandar Lampung merupakan pusat pertumbuhan, sekaligus pusat pemerintahan di Provinsi Lampung. Sebagai pusat pertumbuhan, Bandar Lampung menjadi sentra pemasaran produk-produk hilir dari daerah-daerah sekitarnya. Diperlukan juga kelembagaan ekonomi untuk mendukung industrialisasi produk-produk unggulan tersebut, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengembangan Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan tersebut didukung wilayah sekitar, yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Pasawaran, Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus. Untuk kawasan perkebunan dan peternakan berada di Kabupaten Lampung Barat dan Way Kanan.

Beberapa konsep penting yang mendasari pengembangan kluster industri perlu dideskripsikan untuk mendukung operasionalisasi konsep dalam implementasi program-program SIDA terkait dengan deskripsi Agro-Ekowisata Provinsi Lampung serta industri pendukungnya. Adapun beberapa definisi konsep secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Agrobisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik pada sektor hulu maupun hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agrobisnis bekerja pada rantai sektor pangan (*food supply chain*). Agrobisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran.
- Perikanan, menurut UU No. 31 Tahun 2004, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

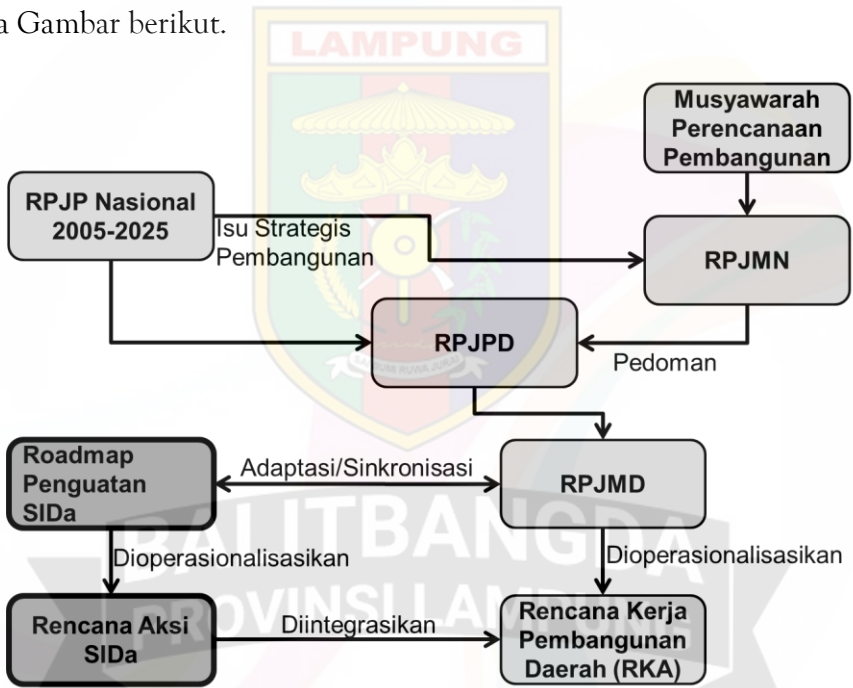
- Agrobisnis peternakan secara umum dapat dimaknai sebagai kegiatan usaha yang terkait dengan subsektor peternakan, mulai dari pembibitan, penyediaan sarana produksi pakan hijauan maupun nutrisi buatan hasil fermentasi, perkandangan, proses produksi (budidaya), penanganan pascapanen, pengolahan, sampai pemasaran produk ke konsumen.
- Hortikultura diartikan sebagai jenis tanaman yang dibudidayakan. Bidang kerja hortikultura meliputi pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, hama dan penyakit, pengemasan dan distribusi. Hortikultura merupakan salah satu metode budidaya pertanian modern dan memfokuskan pada budidaya tanaman buah (frutikultura), tanaman bunga (florikultura), tanaman sayuran (olerikultura), tanaman obat-obatan (biofarmaka).
- Sistem agrobisnis perkebunan adalah suatu pendekatan usaha yang bersifat sistem, mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang, atau suatu sistem yang kompleks dan dinamis, sehingga pengembangan agrobisnis perkebunan idealnya juga menggunakan pendekatan sistem, baik subsistem hulu maupun subsistem hilir. Perbedaan mendasar antara agrobisnis pangan dengan agrobisnis perkebunan adalah pada subsistem produksi. Untuk agrobisnis pangan, benih hanya digunakan sekali pada satu musim tanam, dan pada musim tanam selanjutnya akan digunakan benih lain, periode tunggu produksi awal relatif singkat. Sedangkan pada agrobisnis perkebunan, satu benih dapat berproduksi berkali-kali dalam beberapa musim tanam, sampai umur dimana tanaman tersebut tidak dapat berproduksi lagi. Periode tunggu awal lebih lama dibandingkan agrobisnis pangan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan metode dalam perhitungan kelayakan usaha antara kedua jenis agrobisnis tersebut, dimana agrobisnis pangan menggunakan R/C atau B/C ratio, sedang

agrobisnis perkebunan menggunakan IRR atau NPV (*net present value*).

- Industri Kerajinan Rakyat adalah keahlian dalam menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan warga masyarakat setempat dan memiliki fungsi pakai dan/atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Dengan kata lain, kerajinan merupakan sebutan bagi suatu benda hasil karya seni manusia. Kerajinan terdiri dari dua jenis, yaitu:
 1. Kerajinan bahan alam, yaitu kerajinan yang terbuat dari bahan alam atau bahan dasarnya bahan-bahan alam seperti: serat kayu, bambu, rotan, dll.
 2. Kerajinan bahan buatan, merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan buatan seperti plastik, gips, sabun, lilin, dan lain lain.
- Konsep ekowisata mengarah pada makna:
 1. Aktivitas ekonomi (industri, UMKM, perdagangan) dalam bidang agrobisnis pertanian tanaman bahan makanan dan hortikultura sebagai basis pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung.
 2. Ekologi dalam bidang agrobisnis pertanian sebagai basis pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung yang mengacu pada:
 - (1) Kelestarian lingkungan sumber daya alam
 - (2) Kelestarian lingkungan sumber daya manusia, religiusitas, sosial, budaya, dan kearifan lokal lainnya.
- Kutub-Kutub Pertumbuhan
Kutub pertumbuhan merupakan kutub-kutub kawasan tertentu yang memenuhi prinsip aglomerasi potensi kawasan yang mempertimbangkan posisi kawasan strategis pasar, didukung keunggulan komparatif kawasan, serta didukung sumber daya manusia, pasar, sentra industri, dan potensi pariwisata dalam rangka menciptakan daya saing daerah. Dalam operasionalisasinya, dalam

menentukan kluster industri yang dipilih harus mempertimbangkan kutub-kutub pertumbuhan agar terjadi proses hilirisasi produk secara efisien, untuk menjamin keberlanjutan program.

Selain itu, program-program pembangunan yang akan diimplementasikan melalui SIDA dapat ditunjukkan melalui Kedudukan Roadmap SIDA dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.3. Kedudukan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Provinsi Lampung memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009–2029, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan

perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Penguatan Sistem Inovasi Daerah juga memperhatikan aspek penataan ruang tersebut, sehingga dapat sinergi dengan agenda pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dalam Perda tersebut dijelaskan, penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam Perda RTRW memuat kawasan strategis, dimana penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung, yaitu “Terwujudnya Keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing.”

Sesuai Perda RTRW, kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Lampung ditetapkan sebagai kawasan tanaman pangan untuk mempertahankan swasembada pangan. Kawasan peruntukan pertanian mencakup 18 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung, meliputi lokasi pertanian lahan basah yang ditetapkan di seluruh wilayah Provinsi

Lampung, kecuali Kota Bandar Lampung. Kawasan ini secara spesifik diarahkan untuk pertanian lahan basah dengan produksi komoditas tanaman padi. Sedangkan luas areal pertanian tanaman pangan lahan kering dengan komoditas unggulan ubi kayu dan jagung, diupayakan untuk dipertahankan, terutama untuk mengembangkan pertanian kerakyatan. Pengembangan pertanian lahan kering selanjutnya diarahkan diseluruh kabupaten pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan yang sesuai, kecuali pada Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus.

Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Lampung mencakup 27,3 persen dari luas wilayah provinsi, dan terdiri dari perkebunan yang bersifat kerakyatan dan perkebunan skala besar. Perkebunan yang bersifat kerakyatan yaitu perkebunan kopi, lada, kakao, dan kelapa dalam. Lahan yang cukup sesuai untuk perkebunan rakyat diarahkan berlokasi di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Pringsewu, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tanggamus.

Sedangkan perkebunan skala besar diarahkan untuk tanaman tebu, karet, dan kelapa sawit. Lahan produktivitas untuk perkebunan skala besar diarahkan berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, Mesuji, Pesawaran, Tulangbawang Barat, dan Tulangbawang.

Kawasan peruntukan perikanan mencakup 1,61% dari luas wilayah Provinsi Lampung dan terbagi dalam tiga wilayah, yaitu: sepanjang pesisir pantai timur di Laut Jawa, Selat Sunda di Teluk Lampung dan Teluk Semangko, serta sepanjang pesisir Pantai Barat. Jenis perikanan yang dikembangkan di kawasan perikanan terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya kolam, dan sentra pengolahan hasil perikanan.

Sebaran perikanan tangkap meliputi daerah pesisir Pantai Barat, Teluk Lampung di Pesawaran, Teluk Semangko di Kabupaten Tanggamus, dan Pesisir Pantai Timur Sumatera lainnya yang didominasi oleh berbagai jenis ikan ekonomis penting, seperti tuna mata besar, setuhuk, setuhuk loreng, tuna sirip biru, dan albakora.

Perikanan budidaya air payau dikembangkan di pesisir pantai Timur dengan memperhatikan kelestarian hutan mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir dan kelautan. Perikanan budidaya kolam dapat dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung, kecuali Kota Bandar Lampung dan Metro. Pengembangan pelabuhan perikanan untuk meningkatkan nilai ekonomis sektor perikanan di lokasi-lokasi Kabupaten Lampung Barat di Kuala Krui dan Bengkunt; Kota Bandar Lampung di Lempasing; Kabupaten Tanggamus di Kota Agung; serta Kabupaten Lampung Timur di Labuan Maringgai.

Kawasan peruntukan industri mencakup 0,6 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung, dan terdiri dari kawasan industri usaha mikro, kecil dan menengah; kawasan industri (*industrial estate*); dan kawasan peruntukan industri. Pengelolaan kawasan industri usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten yang lokasi-lokasi berada di dekat sentra-sentra penghasil sumber daya di bagian tengah provinsi ke arah Timur Provinsi Lampung. Kawasan industri menengah/*manufaktur* terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulangbawang, Mesuji, Lampung Timur, Tanggamus, Lampung Utara, dan Pesawaran.

Kawasan pariwisata dikembangkan dan diarahkan bagi potensi wisata alam dengan menekankan kegiatan perjalanan wisata yang aktif dan pengayaan wawasan pengetahuan (*gaining insight*). Pengembangan pariwisata dilakukan dengan mendorong motivasi wisatawan mencari

sesuatu yang baru, otentik, dan mempunyai pengalaman perjalanan wisata yang berkualitas. Selain itu, mendorong motivasi dan keputusan untuk melakukan perjalanan yang ditentukan oleh minat tertentu/khusus dari wisatawan dan bukan dari pihak-pihak lain, juga mendorong wisatawan melakukan perjalanan berwisata pada umumnya untuk mencari pengalaman baru yang dapat diperoleh dari obyek sejarah, makanan lokal, olah raga, adat istiadat, kegiatan di lapangan, dan petualangan alam

Pengembangan pariwisata juga ditujukan pada kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan lindung dikembangkan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS) dan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Wisata bahari dikembangkan di sepanjang pesisir Lampung, khususnya di sepanjang pesisir Barat Sumatera.

Di Provinsi Lampung juga ditetapkan kawasan strategis, yaitu pada wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Lampung ditetapkan di Kawasan Selat Sunda dengan fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan secara ekonomi. Penetapan kawasan strategis nasional tersebut berdasarkan pertimbangan memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena menghubungkan transportasi laut Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, juga memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata terutama kawasan Krakatau yang merupakan warisan dunia (*world heritage*).

Penetapan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek ekonomi terdiri dari:

- a. Kawasan Metropolitan Bandar Lampung;
- b. Kawasan Agropolitan;
- c. Kota Terpadu Mandiri (KTM);

- d. Kawasan Berikat tambak udang;
- e. Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang;
- f. Kawasan Agro Minapolitan;
- g. Kawasan Bakauheni; dan
- h. Pusat Kegiatan Lokal.

Penetapan kawasan Metropolitan Bandar Lampung ditujukan untuk menciptakan sebuah kota yang kompak, efisien, dan mencegah terjadi penumpukan aktivitas di satu kawasan. Lingkup dari kawasan Metropolitan Bandar Lampung ditetapkan berlokasi di Kota Bandar Lampung dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Pengembangan kawasan metropolitan Bandar Lampung diarahkan untuk:

- a. pusat kegiatan yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk aktivitas sosial dan ekonomi;
- b. mengurangi berbagai persoalan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur secara lebih terpadu dan pengelolaan lingkungan yang lebih berwawasan lingkungan melalui pengembangan ruang-ruang terbuka hijau;
- c. menyediakan peluang investasi dan lapangan pekerjaan;
- d. ketersediaan fasilitas pelayanan dan jasa yang efisien, seperti sistem informasi, perbankan, jaringan pemasaran dan prasarana ekonomi

Kawasan agropolitan ditetapkan berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Utara, Lampung Timur, Pesawaran, Mesuji, Way Kanan, Tulangbawang Barat, dan Tulangbawang. Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya

keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Sedangkan kawasan Agro Minapolitan ditetapkan di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) ditetapkan berlokasi di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Way Kanan. Pengembangan KTM ini ditujukan untuk mendistribusikan pusat-pusat perekonomian agar tidak terkonsentrasi di Kota Bandar Lampung. Kota Terpadu Mandiri dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Provinsi Lampung bagian Utara.

Pengembangan kawasan strategis berdasarkan aspek sosial budaya di Provinsi Lampung diarahkan pada pengembangan kawasan pusat pendidikan terpadu berbasis potensi lokal, yaitu di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro, dengan tujuan menghasilkan sumber daya manusia terampil yang mampu menciptakan berbagai inovasi untuk mengolah sumber daya alam Provinsi Lampung yang melimpah. Sedangkan pengembangan kawasan strategis provinsi berdasarkan aspek pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi, ditetapkan Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Lampung 2010-2025, disebutkan industri pariwisata saat ini menjadi salah satu sektor unggulan dan sedang didorong agar menjadi salah satu sektor yang dapat memberi andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Lampung. Perkembangan pariwisata yang berjalan dengan baik, dan ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan baik dalam provinsi maupun diluar provinsi yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Provinsi Lampung. Dengan adanya kemajuan tersebut maka dibutuhkan semua pihak terutama pemerintah yang memang secara langsung dapat

mengelola atau memanajemen objek wisata yang ada didaerahnya, agar dapat mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

Karakteristik produk destinasi wisata yang ada pada Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Provinsi Lampung, terbagi menjadi tiga kawasan, diantaranya:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pesisir, Pantai Barat dan TNBBS
- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Way Kambas.

Teluk Lampung dan Selat Sunda merupakan kawasan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) objek wisata, kawasan ini terdapat banyak pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam dan dunia bawah laut yang memukau. Teluk Lampung yang luasnya sekitar kurang lebih 1.888 km² ini merupakan wilayah perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata mencapai 20 meter. Dengan pesona alam yang indah mendorong jumlah pertumbuhan wisatawan yang senantiasa berkunjung ke objek-objek wisata yang ada dikawasan ini. Objek wisata yang ada di kawasan ini sebagian besar berupa pantai yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Karakteristik produk wisata dalam DPD Teluk Lampung dan Selat Sunda meliputi beberapa daerah, diantaranya:

- a. Kota Bandar Lampung
- b. Kabupaten Lampung Selatan
- c. Kabupaten Pesawaran.

2.3. Kondisi SIDA Saat Ini

Provinsi Lampung memiliki cukup banyak jenis komoditas unggulan, khususnya dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Komoditas tersebut tersebar di kabupaten dan kota, yang berpeluang untuk dikelola guna menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Sistem inovasi daerah

(SIDa) di Provinsi Lampung sebelumnya lebih fokus pada pengelolaan salah satu komoditi unggulan dari sektor pertanian, yaitu ubi kayu dimana Lampung menjadi pemasok terbesar ubi kayu secara nasional.

Kondisi SIDa sebelumnya lebih mengarah pada kluster komoditi unggulan ubi kayu yang diarahkan dalam rangka hilirisasi dan industrialisasi komoditi tersebut. Pendekatan kluster komoditi tersebut dirasakan sangat terbatas dalam konteks pengembangan SIDa di Provinsi Lampung, mengingat masih banyak potensi daerah lainnya yang dapat disinergikan dalam kerangka SIDa, yang diharapkan dapat lebih efektif mendukung upaya peningkatan daya saing kompetitif daerah pada tingkat regional dan nasional. Oleh karena itu, pemutakhiran (updating) terhadap konsep SIDa dilakukan, dengan menggunakan pendekatan aglomerasi, dimana potensi yang ada di kabupaten dan kota disinergikan secara lebih komprehensif dan efektif.

Pertanian

Pemilihan fokus kluster ubi kayu tersebut cukup beralasan, dilatarbelakangi potensi komoditi yang cukup besar di daerah ini. Sebagai gambaran SIDa saat ini, yang lebih menitikberatkan pada inovasi pada sektor pertanian, dimana komoditi yang menjadi fokus hilirisasi adalah ubi kayu. Sebagai komoditas unggulan, ubi kayu memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat ubi kayu adalah komoditas yang sebagian besar kegiatan produksinya melibatkan masyarakat petani, sehingga pengembangannya sangat sesuai untuk tujuan penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kehidupan sebagian besar petani di perdesaan Provinsi Lampung juga sudah sangat lekat dengan kegiatan agrobisnis ubi kayu.

Ubi kayu merupakan sumber pati yang sangat baik untuk bahan baku pangan dan industri. Peran ubi kayu sebagai sumber bahan pangan

semakin penting ditengah ketergantungan terhadap beras yang sangat dominan pada masyarakat Indonesia. Saat ini cukup berkembang inovasi-inovasi diversifikasi produk pangan yang menggunakan ubi kayu sebagai bahan baku utama untuk membuat produk pangan akhir. Porsi komponen pati dari ubi kayu cenderung meningkat dalam berbagai aneka produk pangan olahan, seperti roti, biskuit, kue basah, dan lain-lain. Pada sisi lain, penggunaan komponen ubi kayu sebagai bahan baku dalam industri non-pangan—seperti energi, kosmetik, farmasi, bioplastik—juga semakin meningkat. Peningkatan aneka jenis produk hilir ubi kayu tersebut secara langsung akan berimplikasi terhadap peningkatan jumlah kebutuhan produk ubi kayu pada masa yang akan datang.

Terkait dengan potensi industri berbasis ubi kayu tersebut, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 95 tahun 2010 tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Lampung. Pada Peraturan Menteri tersebut ditetapkan bahwa salah satu industri unggulan Provinsi Lampung adalah industri pengolahan ubi kayu. Industri pengolahan ubi kayu meliputi industri tapioka (KBLI 10621), industri pati dan produk pati (KBLI 10622), serta industri makanan ringan (KBLI 10794).

Pada proses produksi (budidaya) ubi kayu serta proses pengolahan hasil ubi kayu, dapat diperoleh aneka jenis produk samping (*by-products*) dalam keragaman yang cukup besar. Daun dan batang singkong saat ini sudah dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Selain itu, hasil sampingan dari pabrik tapioka berupa limbah padat atau onggok juga merupakan pakan ternak yang potensial. Pada sisi lain, limbah cair asal pabrik tapioka, yang selama ini menyebabkan pencemaran lingkungan, juga telah dimanfaatkan untuk menghasilkan energi berupa biogas yang sangat bermanfaat untuk memasok kebutuhan energi bagi industri dan rumah tangga.

Kebutuhan energi untuk menunjang kehidupan manusia terus tumbuh dengan pesat. Sementara, pasokan energi berbahan asal fosil secara konsisten mulai menurun. Menjadi jelas bahwa sumber-sumber energi terbarukan semakin vital perannya pada masa mendatang. Terkait sumber energi nabati, ubi kayu memiliki potensi yang sangat baik untuk menghasilkan bioetanol. Saat ini peran ubi kayu sebagai bahan baku penghasil bioetanol semakin meningkat, termasuk di Provinsi Lampung.

Berdasarkan potensi produksi, komoditas ubi kayu sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah dan nasional. Pada 2011 nilai *share* produksi ubi kayu di Provinsi Lampung mencapai 38% dari total produksi ubi kayu nasional. Fakta ini menunjukkan Provinsi Lampung layak menjadi pusat pengembangan inovasi teknologi dan hilirisasi agrobisnis ubi kayu nasional. Sebagai pusat pengembangan inovasi teknologi dan hilirisasi, agrobisnis ubi kayu di Provinsi Lampung secara bertahap akan berkembang searah dengan negara mitra agrobisnis ubi kayu.

Selain ubi kayu, Provinsi Lampung juga memiliki beberapa komoditas strategis lainnya, antara lain, padi, jagung, sapi potong, kambing Saburai, ayam probiotik, tebu, kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Sentra produksi beberapa komoditas tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di provinsi ini. Dengan mencermati wilayah penyebarannya maka komoditas unggulan tertentu berpeluang untuk dikembangkan secara lebih progresif menjadi tema SIDA di kabupaten/kota sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Dengan kata lain, setiap kabupaten dan kota dapat mengembangkan komoditas unggulan strategis tersebut menjadi tema SIDA, sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pada 2016, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Sesuai Peraturan Menteri

Pertanian tersebut, setiap provinsi diberikan mandat untuk mengembangkan komoditas unggulan melalui pendekatan kawasan pertanian. Kawasan pertanian dimaksud terdiri atas Kawasan Pertanian Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Kawasan Pertanian Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, serta Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Padi merupakan salah satu komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap beras sebagai makanan pokok. Kebutuhan beras nasional cenderung meningkat setiap tahun seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan produksi padi nasional merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional dan daerah. Saat ini sentra produksi padi masih terpusat di Pulau Jawa, meskipun wilayah lain secara perlahan mulai berkembang menjadi sentra produksi padi, termasuk Provinsi Lampung dan daerah-daerah lain.

Provinsi Lampung termasuk daerah surplus produksi padi, dan berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan beras nasional. Mencermati laju pembangunan daerah yang semakin pesat dan adanya ancaman alih fungsi lahan pertanian padi, Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyusun perencanaan yang sistematis dan komprehensif terkait pengembangan agrobisnis komoditas padi. Terlebih padi termasuk komoditas politik, yang sangat rentan memicu gangguan stabilitas keamanan nasional apabila terjadi kelangkaan.

Selain menghasilkan produk utama padi, tanaman padi juga menghasilkan jerami padi, bekatul, dan dedak padi. Keempat jenis produk tersebut memiliki kegunaan yang luas. Selain untuk pakan ternak, jerami padi dapat digunakan keperluan industri. Bekatul dan dedak padi merupakan pakan ternak konvensional yang bernilai gizi tinggi, terutama untuk ternak unggas. Dengan demikian, pengembangan

agrobisnis padi memiliki *multiplier effect* yang luas terhadap pengembangan bisnis komoditas lain.

Sebagai salah satu komoditas pangan strategis, produksi komoditas jagung di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir terus meningkat. Hal ini seiring upaya pemerintah menekan ketergantungan terhadap jagung impor. Komoditas jagung juga termasuk komoditas unggulan di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung termasuk salah satu daerah yang dikenal sebagai sentra produksi jagung nasional; Peringkat ketiga setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya, Provinsi Lampung berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan jagung nasional.

Produksi jagung sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak yang sampai saat ini cukup berkembang di daerah. Kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak berkisar 5 juta ton per tahun dengan laju kenaikan sekitar 10-15% setiap tahunnya. Dengan demikian, seharusnya produksi jagung dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan pabrik pakan ternak. Namun, produksi jagung di Indonesia umumnya bersifat musiman dan wilayahnya tersebar. Kondisi ini membuat produksi jagung dalam negeri sulit memenuhi persyaratan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan.

Hal tersebut menyebabkan para pelaku industri pakan ternak condong memilih melakukan impor jagung. Ketergantungan pabrik pakan ternak terhadap jagung impor sangat tinggi, yaitu sekitar 40% atau lebih kurang dari 1 juta ton per tahun. Pabrik-pabrik pakan ternak memiliki kapasitas penyimpanan jagung dalam bentuk silo dan gudang-gudang penyimpanan yang terbatas. Sementara, para petani dan pedagang juga belum memiliki gudang penyimpanan yang memadai. Akibatnya, pada musim panen produksi jagung melimpah dan harga menjadi rendah. Kondisi ini menyulitkan petani meningkatkan pendapatannya. Sentra produksi jagung di Provinsi Lampung ada di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Lampung Tengah.

Masalah alih fungsi lahan juga menjadi persoalan besar yang perlu dicermati oleh pemerintah.

Peternakan

Pada sektor pembangunan peternakan nasional, saat ini komoditas ternak sapi merupakan salah satu komoditas yang memiliki posisi yang strategis dari sisi ekonomi dan penyediaan protein hewani. Komoditas ini perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terkait baik di daerah dan nasional. Sebagai produk yang digemari oleh banyak kalangan, laju pertumbuhan permintaan komoditas ternak sapi di Indonesia termasuk sangat tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan produksinya. Akibatnya, impor daging sapi dan impor ternak sapi hidup menjadi sangat tinggi dan membebani devisa negara.

Subsektor peternakan merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung. Sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, pembangunan peternakan di provinsi ini memiliki prospektif yang baik. Komoditas ternak sapi potong termasuk yang diunggulkan di Provinsi Lampung. Selain itu, komoditas ternak sapi potong termasuk sangat cocok untuk program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Beberapa hal mendasari pemikiran tersebut, antara lain: (a) komoditas ini sangat diminati oleh masyarakat (dan konsumen) sehingga dominan dibudidayakan oleh masyarakat petani; (b) potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat menunjang; dan (c) pasar untuk komoditas ternak sapi sangat terbuka, terutama untuk pasar di DKI Jakarta dan daerah lain di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Populasi sapi potong di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.2. Data Populasi Sapi Potong di Provinsi Lampung (ekor)

WILAYAH	JUMLAH		
	POPULASI TERNAK (SAPI)		
	2014	2015	2016
Lampung Barat	5.087	5.810	6.261
Tanggamus	4.516	6.145	6.265
Lampung Selatan	110.214	111.195	113.152
Lampung Timur	114.366	118.188	125.676
Lampung Tengah	205.986	260.054	260.569
Lampung Utara	25.764	28.017	28.437
Way Kanan	33.200	33.452	33.707
Tulang Bawang	18.959	18.902	19.084
Pesawaran	15.354	16.489	16.886
Pringsewu	10.691	10.807	10.906
Mesuji	10.650	8.886	8.537
Tulang Bawang Barat	15.878	17.393	17.917
Pesisir Barat	9.110	10.777	9.588
Bandar Lampung	2.103	1.785	1.504
Metro	5.949	6.098	7.223
Provinsi Lampung	587.827	653.998	665.712

Sumber: BPS Provinsi Lampung 2017.

Secara khusus, Provinsi Lampung sejak 1990 dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi ternak sapi potong nasional. Karenanya, peran Provinsi Lampung sangat strategis mengingat daerah ini memiliki sumber daya serta peluang besar untuk terus meningkatkan produksi ternak sapi. Peningkatan produksi ternak sapi potong di Provinsi Lampung masih terbuka luas, baik melalui upaya peningkatan populasi maupun melalui upaya peningkatan produktivitas ternak, yaitu dengan menerapkan paket-paket teknologi tepat guna dan inovatif untuk budi daya sapi potong.

Selama lebih dari satu dasa warsa Pemerintah Provinsi Lampung

mengembangkan jenis ternak kambing unggul, yang kemudian diberi nama Kambing Saburai. Kambing Saburai merupakan kambing hasil persilangan (*crossbreeding*) antara kambing jantan unggul Boer dengan kambing betina Peranakan Etawa (PE). Tahap awal pengembangan kambing Saburai dimulai di Kabupaten Tanggamus pada 2002. Program unggulan pemerintah daerah di bidang peternakan ini dinilai sukses dan berhasil, karena ternak unggul Kambing Saburai (Grade-2) yang dihasilkan dapat beradaptasi dan berkembang dengan baik di Provinsi Lampung.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, kambing Saburai sangat disukai masyarakat peternak. Karena itu, kambing Saburai sangat cepat berkembang di kalangan peternak rakyat. Partisipasi peternak dinilai sangat positif dan berperan besar dalam peningkatan populasi serta penyebarannya. Pengembangan kambing Saburai di Provinsi Lampung dapat menjadi salah satu contoh nyata pembangunan peternakan berbasis partisipasi masyarakat.

Atas keberhasilan tersebut, pemerintah pusat memberikan apresiasi dan penghargaan. Bentuk apresiasi pemerintah pusat antara lain berupa penetapan Kambing Saburai sebagai sumber daya genetik lokal Provinsi Lampung. Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 10 Juni 2015. Dengan demikian, kambing Saburai (Grade-2) saat ini sudah menjadi salah satu produk iptek kebanggaan Provinsi Lampung.

Penetapan kambing Saburai sebagai sumber daya genetik lokal Provinsi Lampung perlu ditindaklanjuti dengan terus meningkatkan mutu genetik, populasi, produktivitas, serta penyebarannya di daerah dan nasional. Upaya percepatan pengembangannya tentu saja harus dilaksanakan secara sistematis, bertahap, dan komprehensif dengan melibatkan partisipasi *stakeholders*. Program percepatan pengembangan harus mencakup aspek SDM dan kelembagaan, pembibitan, teknologi

reproduksi, teknologi pakan, teknologi budidaya, pengendalian kesehatan ternak, regulasi, dan lainnya.

Ukuran populasi merupakan modal dasar untuk pengembangan jenis ternak tertentu. Populasi ternak kambing Saburai di Provinsi Lampung masih sangat kecil. Pada Tabel berikut disajikan data populasi kambing Saburai di Provinsi Lampung. Pada 2014 jumlah kambing Saburai di Provinsi Lampung sebanyak 26.399 ekor. Sebagian besar ternak kambing Saburai tersebut berada di Kabupaten Tanggamus (97.2%). Karena itu, Kabupaten Tanggamus layak menjadi sentra bibit kambing Saburai. Sebagian kecil dari populasi kambing Saburai tersebut menyebar ke Kabupaten Pringsewu dan Pesawaran. Kabupaten Tanggamus memang dikenal sebagai salah satu sentra produksi ternak kambing. Wilayah kabupaten ini sangat cocok untuk pengembangan ternak kambing. Daya dukung pakan hijauan makanan ternak sangat menunjang. Selain itu, kondisi agroekosistem dan iklim juga kondusif. Oleh karena itu, cukup beralasan untuk mengembangkan daerah ini sebagai sentra perbibitan kambing Saburai.

Tabel 2.3. Populasi Kambing Saburai di Provinsi Lampung

No	Lokus	Populasi (ekor)						Jumlah
		Dewasa		Muda		Anak		
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	
1	Tanggamus	2.565	3.848	3.142	5.836	5.643	4.617	25.651
2	Pesawaran	44	148	86	14	49	58	399
3	Pringsewu	11	43	19	13	15	22	123
4	Inst. Negeri Sakti	19	43	13	7	6	1	89
Jumlah		2.656	4.137	3.277	5.890	5.725	4.714	26.399

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Lampung, 2017

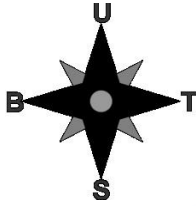
Dari profil populasi seperti pada Tabel di atas tampak bahwa jumlah ternak kambing Saburai betina sangat terbatas. Pada kondisi

tersebut tampak bahwa nisbah antara ternak jantan dan betina adalah 0.44 : 0.56. Berarti jumlah ternak betina hanya sedikit lebih besar dari ternak kambing Saburai jantan. Guna percepatan pertumbuhan populasi, selayaknya jumlah ternak kambing betina harus lebih banyak dari kambing jantan. Karena itu, salah satu strategi pengembangan kambing Saburai ke depan adalah meningkatkan populasi induk kambing Saburai. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan dengan: (a) pengendalian pemotongan kambing betina produktif; (b) mendatangkan kambing betina calon indukan; dan (c) penerapan teknologi reproduksi (rekayasa) untuk menghasilkan lebih banyak kambing betina.

Pariwisata

Kawasan wisata Teluk Lampung yang berlokasi diperaian Selat Sunda pada bagian Selatan Provinsi Lampung, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu destinasi unggulan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi. Kawasan ini memiliki beragam atraksi wisata bahari yang didukung oleh keberadaan pantai sepanjang sekitar 124 km dari Kalianda sampai dengan Pesawaran, beragam pulau-pulau kecil, ketersediaan *water sport* termasuk *snorkling* dan *diving*, Gunung Anak Krakatau, serta wisata budaya yang terwujud dalam festival skala nasional dan internasional. Atraksi utama dari kawasan pariwisata Teluk Lampung adalah, di bagian Kalianda dengan keindahan wisata alam pantai serta Gunung Anak Krakatau termasuk beberapa *sport activity*. Di sisi lain, untuk mengenang meletusnya Gunung Krakatau terdapat festival budaya yang diadakan setiap tanggal 26 dan 27 Agustus setiap tahun. Pesawaran, keindahan alam pantai dan pulau-pulau kecil, spot lumba-lumba termasuk *sport activity* diantaranya *snorkling*, *diving* maupun kayak.

POLA TELUK LAMPUNG



Sumber: RIPPARDA Provinsi Lampung 2020–2025

POLA TELUK KILUAN



Sumber: RIPPARDA Provinsi Lampung 2020–2025

POLA LAMPUNG SELATAN



Sumber: RIPPARDA Provinsi Lampung 2020–2025

Kelembagaan dan Daya Dukung Iptek

Secara umum, kondisi kelembagaan dan daya dukung Iptek/Litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM di Provinsi Lampung sudah berkembang cukup memadai. Namun, tetap masih diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri. Penguatan kelembagaan yang diperlukan termasuk aspek SDM, sarana dan prasarana, tupoksi dan organisasi, serta regulasi.

Cakupan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM di Provinsi Lampung terdiri atas:

- a. Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah;
- b. Daya Dukung Iptek.
- c. Daya Absorpsi Industri, khususnya UMKM.

Selain lembaga kelitbangan pemerintah daerah, di Provinsi Lampung juga terdapat lembaga kelitbangan yang dikelola pemerintah pusat (kementerian dan nonkementerian), seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Balai Besar Teknologi Pati Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TP-BPPT), Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), serta Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristan). Di samping itu, lembaga lainnya yang melaksanakan fungsi kelitbangan adalah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di daerah. Lembaga-lembaga tersebut bahkan sudah lebih dahulu eksis dan berkiprah di daerah sejak sebelum Balitbangda Provinsi Lampung terbentuk.

Dalam melaksanakan tugas kelitbangan, Balitbangda Provinsi Lampung secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan lembaga-lembaga tersebut. Di samping itu, Balitbangda juga

bersinergi dengan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Lampung dalam mengembangkan penelitian dan pengembangan di daerah, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaannya. Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung beranggotakan akademisi dan pakar dari berbagai perguruan tinggi di Lampung, seperti Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Universitas Bandar Lampung (UBL), dan Sekolah Tinggi Dharmajaya. Kepakaran anggota DRD Provinsi Lampung cukup beragam, seperti bioteknologi, transportasi, ekonomi, teknik, pemerintahan, peternakan, farmasi, pertanian, energi terbarukan, agroindustri, pendidikan, kelautan, teknologi informasi dan komunikasi, antropologi, kesehatan, pariwisata, sampai dengan seni dan budaya. Struktur DRD Provinsi Lampung terdiri dari komisi-komisi yang membidangi kedaulatan pangan dan inovasi; infrastruktur, energi, teknologi informasi dan komunikasi; sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan; serta kemaritiman, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Daya dukung Iptek dalam proses hilirisasi dan industrialisasi sektor-sektor ekonomi di Provinsi Lampung belum bisa dikatakan optimal. Riset-riset yang dilakukan lembaga kelitbangan, khususnya perguruan tinggi, masih relatif belum terdifusikan sampai pada kemanfaatan ekonomi atau industri. Meski demikian, kegiatan Litbangyasa di daerah ini cukup berkembang, terutama dalam bidang pertanian yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Lampung. Daya dukung Iptek ini masih harus terus dikembangkan melalui kerja sama dan sinergi lintas bidang ilmu dan lintas lembaga, termasuk melibatkan pelaku usaha dan komunitas masyarakat, sehingga kemanfaatan dari hasil kelitbangan dapat lebih dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan dapat mendorong perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing daerah.

Kolaborasi dan Difusi Teknologi

Secara umum kolaborasi inovasi dan difusi Iptek di Provinsi Lampung masih belum berjalan secara optimal. Kolaborasi antarlembaga Iptek dan Litbang yang ada masih belum maksimal dalam mendorong peningkatan daya saing daerah. Diperlukan perhatian pemerintah untuk terus mengembangkan kolaborasi inovasi dan difusi teknologi secara optimal. Kolaborasi inovasi tidak hanya antarlembaga-lembaga Iptek dan Litbang, melainkan juga dengan para pelaku bisnis dan masyarakat.

Kolaborasi inovasi dan difusi teknologi ini diharapkan dapat semakin optimal dengan pengembangan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah secara efektif. Pelibatan aktif dan setara antara akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, dan komunitas masyarakat akan membuka ruang lebih luas untuk terbangunnya kolaborasi antarunsur dan difusi teknologi. Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam era industri 4.0 saat ini, kolaborasi inovasi dan difusi teknologi menjadi satu kebutuhan. Inovasi tidak akan berkembang tanpa adanya kolaborasi antardisiplin ilmu dan/atau antarunsur pelakunya.

Kondisi kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi yang masih harus diperhatikan di Provinsi Lampung antara lain meliputi:

- a. Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pengembangan dan penguatan inovasi (jaringan Sistem Inovasi Daerah), antara lain dengan menumbuhkan wahana lintasunsur SIDA dan lintasdisiplin ilmu (multidisiplin), serta penguatan program strategis dan inovatif;
- b. Peningkatan difusi teknologi, antara lain dengan meningkatkan difusi hasil-hasil Iptek dan Litbangyasa baik dalam bentuk teknologi tepat guna, praktik baik, pengetahuan, kepakaran, dan alih inovasi;
- c. Pelayanan berbasis teknologi, yaitu dengan mendorong lembaga-lembaga Iptek dan Litbang memberikan berbagai bentuk pelayanan teknologi untuk peningkatan kapasitas para adopter.

Budaya Inovasi

Walaupun masih belum menggembirakan, secara umum kondisi budaya inovasi di Provinsi Lampung saat ini mulai tumbuh. Perkembangan yang cukup nyata terlihat adalah pada sektor industri dan sebagian UMKM. Lembaga pendidikan menengah dan perguruan tinggi juga semakin terdorong untuk mengembangkan budaya inovasi sebagai bentuk kesadaran akan perkembangan zaman. Diperlukan program percepatan untuk pengembangan budaya inovasi ini terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama melalui pendidikan formal dan informal, pelatihan-pelatihan, pameran teknologi, lomba inovasi, dan sebagainya. Terkait dengan hal tersebut, perlu perhatian Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan untuk membangun dan mengembangkan iklim dan budaya inovasi di tengah-tengah masyarakat. Ruang-ruang publik kreatif dapat dikembangkan dan dioperasionalkan untuk merangsang munculnya kreatifitas dan inovasi dari semua kalangan masyarakat.

Penguatan budaya inovasi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya antara lain meliputi:

- a. Program penguatan yang dilakukan melalui jalur kurikulum pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan (Diklat), program standardisasi kompetensi, pelatihan kewirausahaan, dan lain sebagainya;
- b. Penguatan kohesi sosial, antara lain melalui inventarisasi, dokumentasi dan sosialisasi teknologi-inovasi yang ada serta kearifan lokal berikut komponen modal sosial lainnya;
- c. Apresiasi dan kampanye inovasi, yaitu dengan cara memberikan apresiasi terhadap karya yang inovatif dan terus mengkampanyekan budaya inovasi;

- d. Pengembangan usaha-usaha baru yang bersifat inovatif, yaitu dengan cara mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang inovatif melalui pemberian insentif dan kemudahan.

Klaster Industri

Aspek keterpaduan selama ini memang menjadi masalah daerah dan nasional dalam berbagai jenis program pembangunan. Pencapaian keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional di Provinsi Lampung secara umum belum memuaskan. Namun, upaya ke arah itu semakin menjadi perhatian berbagai pihak. Diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk membangun keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional, terutama melalui regulasi dan pengembangan kerja sama antar kawasan secara terpadu.

Pendekatan sistem inovasi dan klaster inovasi berbasis komoditi unggulan daerah dapat sedikit dibedakan. Pendekatan SIDA lebih heterogen terkait dengan beraneka-macam potensi masing-masing kabupaten/kota yang hendak dikembangkan dan diintegrasikan dengan memperhatikan aspek kewilayahan pada tingkat provinsi. Sedangkan pendekatan klaster inovasi lebih homogen, di mana yang menjadi orientasi atau basis utama adalah komoditi unggulan daerah sejenis yang hendak dikembangkan dan diindustrialisasikan secara optimal. Pendekatan pembangunan daerah berbasis klaster inovasi merupakan *exit strategy policy* atau langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dengan cara mendorong peningkatan nilai tambah serta industrialisasi komoditi unggulan daerah. Strategi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan SIDA. Dua pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dinamika perekonomian rakyat dengan semakin meningkatnya kapasitas ekonomi masyarakat.

Cakupan program pemajuan sistem inovasi dan kluster industri daerah dan nasional meliputi:

- a. Prakarsa kluster industri spesifik daerah dan/atau prakarsa sistem Inovasi, dengan cara memfasilitasi interaksi aktor bisnis dan nonbisnis dalam suatu jaringan atau kluster industri;
- b. Koordinasi kebijakan (antar-kabupaten/kota dan daerah-nasional), dengan cara membangun mekanisme koordinasi yang lebih terbuka dan dapat memacu sistem inovasi dan berkembangnya kluster industri;
- c. Pengembangan kelembagaan khusus, yang dirancang untuk mempercepat proses kolaborasi inovatif. Kemasan program MP3EI merupakan salah satu bentuk upaya mewujudkan kolaborasi inovatif.

Terkait proses percepatan inovasi teknologi, Pemerintah Provinsi Lampung juga memperhatikan aspek keselarasan dengan isu strategis perkembangan global. Isu-isu strategis tersebut harus menjadi pertimbangan karena implikasinya menjadi suatu keniscayaan. Aspek-aspek strategis tersebut meliputi isu lingkungan (*environment*), standardisasi kompetensi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Asasi Manusia (HAM), ketenagakerjaan, dan lain-lain. Seluruh aspek tersebut menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan kemasan program dan kegiatan bisa disesuaikan, sehingga sejalan dan mendukung spirit implementasi isu-isu universal tersebut.

Zonasi Kawasan SIDA

Kodisi SIDA saat ini masih cenderung menggunakan konsep kluster inovasi, dimana orientasinya lebih kepada hilirisasi produk unggulan daerah, yaitu ubi kayu. Pemutakhiran Peta Jalan Penguatan SIDA Provinsi Lampung 2019-2023 lebih diarahkan pada konsep

aglomerasi industri, dimana klaster inovasi menjadi bagian di dalamnya. Pendekatan aglomerasi industri ini digunakan, karena setiap kabupaten dan kota di Provinsi Lampung memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda-beda, dimana masing-masing membutuhkan pengelolaan khusus. Menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk dapat mengintegrasikan potensi yang berbeda-beda tersebut, sehingga terbangun sinergi pembangunan antardaerah dengan memperhatikan potensinya masing-masing.

Dalam dokumen Roadmap Penguatan SIDA Provinsi Lampung 2019-2023 ini, prioritas integrasi kawasan SIDA meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro. Tema yang menjadi bingkai zonasi SIDA tersebut adalah “Agroekowisata Lampung.” Meski demikian, bukan berarti kabupaten yang lain tidak menjadi perhatian. Hal ini terkait dengan prioritas dan pertimbangan sumber daya yang tersedia. Pengembangan SIDA pada periode selanjutnya akan diarahkan untuk penguatan aglomerasi industri yang mencakup semua kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

Pilar Penguatan SIDA

Pemutakhiran peta jalan (*Roadmap*) Penguatan SIDA Provinsi Lampung 2019-2023 ini merupakan satu bentuk penguatan kebijakan inovasi daerah. Dalam rangka penguatan kebijakan tersebut, diperlukan penataan unsur SIDA sebagai pilar penguatan SIDA yang terdiri dari penataan kelembagaan, penataan sumber daya, dan penataan jaringan SIDA. Dengan agenda penataan unsur SIDA tersebut diharapkan pengembangan sistem inovasi di Provinsi Lampung dapat lebih optimal dan efektif dalam rangka industrialisasi produk unggulan daerah (pertanian dan pariwisata) yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar Pilar Pengembangan SIDA

Kondisi SIDA Provinsi Lampung saat ini secara umum menggambarkan capaian atau kondisi dari setiap elemen kerangka kebijakan inovasi yang telah ada, yang diringkas dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Kondisi SIDA Provinsi Lampung Saat Ini

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDA	Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pilar 1 : Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	a) Dokumen RPJMD dan RPJPD mendukung keberadaan penguatan SIDA, hanya implementasinya perlu dioptimalkan

			<p>b) Basis data/ indikator penting inovasi belum tersedia</p> <p>c) Peran lembaga pendidikan menengah kejuruan unggulan dan pendidikan tinggi belum optimal</p> <p>d) Sistem perizinan dan penanaman modal yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel dan kompetitif berbasis TIK belum terbangun secara maksimal</p> <p>e) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana warga berinteraksi sudah tersedia tetapi fungsinya perlu ditingkatkan menjadi Ruang Publik Kreatif (RPK)</p> <p>f) Alokasi APBD untuk pengembangan Iptekin belum optimal.</p>
		<p>Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung Iptekin atau Litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>a) Kelembagaan penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Lampung masih terbatas</p> <p>b) SDM Iptekin masih terbatas</p> <p>c) Daya serap (adopsi) masyarakat terhadap Iptekin masih terbatas</p>
		<p>Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi</p>	<p>a) Kaidah penguatan SIDA belum tersosialisasi di seluruh aktor di daerah</p> <p>b) Belum teridentifikasi komunitas masyarakat yang akan berinteraksi di ruang terbuka atau Ruang Publik Kreatif</p> <p>c) Pemanfaatan layanan teknologi belum optimal.</p>
		<p>Elemen 4: Budaya inovasi</p>	<p>a) Apresiasi terhadap kegiatan kreatif dan inovatif belum berkembang</p>

			<p>b) Partisipasi masyarakat dalam berinovasi belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah</p> <p>c) Budaya menciptakan kesempatan/ lapangan kerja (entrepreneurship) di kalangan pendidikan menengah masih terbatas</p>
		<p>Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah</p>	<p>a) Kerja sama antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih belum optimal dalam percepatan pembangunan daerah</p> <p>b) Kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal untuk percepatan pembangunan daerah</p>
		<p>Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global</p>	<p>a) Kesetaraan gender masih belum terkelola optimal</p> <p>b) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan masih rendah</p> <p>c) Kesadaran HKI di masyarakat masih lemah</p> <p>d) Fasilitas untuk masyarakat <i>difabel</i> masih belum tersedia.</p>
2	<p>Pilar 2: Penguatan Kluster Industri</p>	<p>Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis</p>	<p>a) Kelembagaan pengelola dan pengembangan kluster pada kawasan Agroekowisata belum berfungsi dengan baik</p> <p>b) Landasan legal bagi pengembangan kawasan Agroekowisata belum tersedia</p> <p>c) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) telah tersusun, tetapi masih perlu pengoptimalan dalam implementasinya</p> <p>d) Akses jalan darat dan sarana angkutan umum menuju objek wisata unggulan di Provinsi Lampung belum optimal</p>

			<p>e) Operator wisata yang profesional belum cukup tersedia</p> <p>f) Fasilitas akomodasi, kuliner dan <i>merchandise</i> (souvenir) belum berkembang dan belum memenuhi standar fasilitas wisata nasional apalagi internasional</p> <p>g) Pusat informasi kepariwisataan belum optimal</p> <p>h) Rencana induk pengembangan kluster hortikultura dan kerajinan rakyat terpadu belum tersusun.</p>
		<p>Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung Iptekin atau Litbangyasa, serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>a) Pasokan Iptekin dalam bidang integrasi agrobisnis hortikultura dan kerajinan rakyat belum berjalan dengan baik</p> <p>b) Pasokan Iptekin industri hortikultura (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) serta kerajinan rakyat belum optimal</p> <p>c) Daya serap Iptekin pelaku industri hortikultura (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat masih terbatas</p> <p>d) Pasokan Iptekin dalam industri pariwisata unggulan Provinsi Lampung masih sangat terbatas</p> <p>e) Daya serap Iptekin pelaku industri pariwisata unggulan di Provinsi Lampung masih rendah.</p>
		<p>Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi</p>	<p>a) Interaksi antara para pemangku kepentingan dalam industri hortikultura dan kerajinan rakyat dengan pemasok Iptekin belum optimal</p>

			b) Interaksi antara para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata dengan pemasok Iptekin belum optimal.
		Elemen 4: Budaya inovasi	a) Budaya inovasi dalam industri holtikultura dan kerajinan rakyat belum berkembang
			b) Budaya inovasi dalam industri pariwisata belum berkembang
			c) Interaksi produktif antara pelaku bisnis dan komunitas masyarakat masih kurang
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	a) Rantai nilai dalam klaster industri holtikultura dan kerajinan rakyat belum kuat (indikator: produktivitas klaster industri holtikultura dan kerajinan rakyat kurang optimal)
			b) Rantai nilai dalam klaster industri pariwisata belum terbangun secara optimal.
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	a) Aktifitas klaster industri holtikultura dan kerajinan rakyat belum berwawasan lingkungan
b) Aktifitas klaster industri pariwisata belum berstandar internasional.			
3	Pilar 3: Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	a) Perizinan investasi khususnya untuk sektor unggulan daerah masih perlu ditata dan ditingkatkan
			b) Instrumen legal penetapan Kawasan Agroekowisata Provinsi Lampung belum disusun
			c) Proses pembangunan awal Kawasan Agroekowisata Provinsi Lampung belum terlaksana.

		<p>Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung Iptekin atau Litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>a) Pusat Litbangyasa untuk mendukung pengembangan kawasan Agroekowisata belum tersedia</p> <p>b) Perguruan Tinggi di kawasan Agroekowisata perlu dioptimalkan peranannya</p> <p>c) Industri pengguna Iptekin di kawasan Agroekowisata masih terbatas</p> <p>d) Jumlah HKI terdaftar masih rendah (per 10.000 penduduk)</p>
		<p>Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi</p>	<p>a) Lembaga pengelola kawasan belum terbentuk</p> <p>b) Pusat belajar masyarakat berupa <i>telecenter</i> atau <i>Broadband Learning Center (BLC)</i> di kawasan Agroekowisata belum ada</p> <p>c) Jaringan yang menghubungkan antara pusat inovasi di kawasan Agroekowisata dengan simpul-simpul pelayanan teknologi di kabupaten/kota dan provinsi lain belum optimal.</p>
		<p>Elemen 4: Budaya inovasi</p>	<p>Budaya berjejaring antara aktor inovasi belum optimal</p>
		<p>Elemen 5: Keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah</p>	<p>a) Keterkaitan antar pelaku pada kawasan Agroekowisata dengan pelaku/asosiasi lokal, nasional, regional, dan internasional belum optimal</p> <p>b) Sinergitas antara aktor dalam kawasan Agroekowisata dengan sentra-sentra industri yang lain belum optimal</p>
		<p>Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global</p>	<p>a) Produk bersertifikasi masih terbatas</p> <p>b) Jumlah pertemuan skala internasional masih sedikit</p> <p>c) Kesadaran HKI masih rendah.</p>

4	Pilar 4: Penguatan Teknopreneur	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	a) Bantuan fasilitasi kredit UMKM belum fokus pada pengembangan kawasan Agroekowisata
			b) Pembiayaan dari lembaga keuangan dan mitra sudah ada tetapi belum optimal
			c) Belum cukup tersedia insentif Pemda untuk pengembangan wirausaha berbasis inovasi (teknopreneur).
		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung Iptekin atau Litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a) Kelembagaan pusat inovasi belum tersedia
			b) Kapasitas absorpsi Iptekin UMKM masih rendah
			c) Inisiatif berwirausaha berbasis Iptekin dari kalangan pemuda masih rendah.
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a) Kolaborasi antar-UMKM inovatif di Provinsi Lampung masih rendah.
b) Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis belum cukup berkembang.			
Elemen 4: Budaya inovasi	Budaya menciptakan kesempatan/lapangan kerja di kalangan pendidikan menengah belum optimal.		
Elemen 5: Keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung kawasan Agroekowisata belum berkembang		
Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	a) Produk dari bisnis inovatif yang terstandar masih sedikit		
	b) Kerja sama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif masih sedikit.		
5.	Pilar 5: Pengembangan Tematik Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Rencana induk dan pedoman/panduan <i>green innovation development (GID)</i> mencakup energi, air bersih, transportasi, informasi & komunikasi, serta lingkungan belum tersedia.

		<p>Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung Iptekin atau Litbangyasa serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM</p>	<p>a) Kelembagaan yang menangani pengembangan <i>Green Innovation Development (GID)</i> belum tersedia</p>
			<p>b) Pasokan Iptekin air bersih, telekomunikasi dan informasi, energi, transportasi, serta lingkungan belum optimal</p>
			<p>c) Kapasitas absorpsi masyarakat terhadap Iptekin masih rendah.</p>
		<p>Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi</p>	<p>Kerjasama Litbangyasa energi, air bersih, informasi dan komunikasi, transportasi, serta lingkungan masih terbatas</p>
		<p>Elemen 4: Budaya inovasi</p>	<p>a) Belum terbentuk komunitas pengembangan inovasi yang ramah lingkungan</p>
			<p>b) Penerapan dan pengembangan inovasi yang ramah lingkungan belum optimal</p>
<p>Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah</p>	<p>Keselarasn standar infrastruktur GID (air bersih, teknologi informasi komunikasi, dan lingkungan) belum ada (indikator: jumlah kebijakan daerah dalam GID)</p>		
<p>Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global</p>	<p>Kerjasama internasional dalam GID (air bersih, teknologi informasi komunikasi, dan lingkungan) belum ada</p>		



BAB III



KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

3.1 Arah Kebijakan Daerah

Sistem perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur bahwa tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan. Perencanaan pembangunan jangka panjang adalah untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menindaklanjutinya dalam perumusan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Panjang

Provinsi Lampung adalah “Lampung yang Maju dan Sejahtera 2025.” Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi ini kemudian dijabarkan dalam misi, sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkannya. Langkah yang memuat program indikatif untuk mencapai visi dan misi dirumuskan dalam bentuk strategi. RPJPD Provinsi Lampung yang merupakan rencana induk pembangunan di Provinsi Lampung menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahun di Provinsi Lampung.

Dalam RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 tersebut dijelaskan, arah pembangunan jangka panjang adalah untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang diinginkan. Diantara arah pembangunan yang relevan dengan lembaga kelitbagan, adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Indonesia dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai kebijakan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia pada masa depan, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur dilandasi penghormatan pada HAM. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan IPTEKS

perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk, termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi warga usia produktif yang jumlahnya semakin besar.

2. Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan seni, serta pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing daerah melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEKS yang berpedoman pada nilai agama, budaya, etika, kearifan lokal, dengan memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Pengembangan IPTEKS untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan IPTEKS dalam rangka mendukung daya saing secara global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan secara luas IPTEKS dalam sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian yang memiliki kemandirian dalam hal pembiayaan, perwujudan sistem pengakuan atas hasil temuan (royalty system, patent, HKI) dan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standard mutu mengacu pada sistem pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana IPTEKS. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan untuk keterkaitan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
4. Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi,

kebutuhan teknologi pertahahan, teknologi kesehatan, pengembangan teknologi material maju, serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan SDM IPTEKS, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan IPTEKS lintas sektor, perumusan agenda riset selaras dengan kebutuhan daerah, peningkatan sarana dan prasarana IPTEKS, serta pengembangan mekanisme intermediasi IPTEKS. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Disamping itu diupayakan peningkatan kerja sama penelitian domestik dan internasional antarlembaga litbang, perguruan tinggi dan dunia usaha, penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura.

5. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya itu dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEKS, dan globalisasi dengan semangat kemitraan, serta kerja sama lintas sektor. Perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, serta upaya promotif dan preventif.
6. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah, dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.
7. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap

dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

8. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional yang sudah ada perlu disempurnakan secara bertahap sehingga bersama sistem perlindungan sosial nasional dapat memberikan perlindungan penuh pada masyarakat yang didukung peraturan perundangan dan pendanaan serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pengembangan sistem jaminan dan perlindungan sosial ini dilaksanakan dengan memperhatikan budaya yang sudah berakar dikalangan masyarakat luas.
9. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja pada sektor informal, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang baik dan efektif. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM. Sebagian besar pekerja akan dibekali dengan pengakuan kompetensi (sertifikasi) profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

10. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender pada tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
11. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEKS, dan politik.
12. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penataan sistem kesejahteraan sosial nasional, serta penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah rawan bencana.

3.2 Visi dan Misi

Visi jangka panjang Provinsi Lampung Maju dan Sejahtera 2025 dimaknai: Maju dikonotasikan modern atau *industrialized*. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum). Perekonomian yang maju berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang memadai. Proses produksi didukung penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan distribusi yang adil dan merata.

Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan merata, yang tercermin dari tingkat pendidikan terendah, tingkat partisipasi pendidikan, dan jumlah

tenaga ahli atau profesional yang dihasilkan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang *civilized*, dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas berpendapat, menggunakan hak politik, kesamaan didepan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib, serta menghargai profesi.

Bangsa yang maju ditandai laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Menjadi provinsi yang maju di Indonesia adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung.

Pemahaman untuk menjadi Lampung maju memiliki pengertian bahwa masyarakat Lampung sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi sumber daya wilayah dan sumber daya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan. Namun, kemandirian bukanlah keterisolasian. Maka keterhubungan dan keterikatan dengan wilayah provinsi lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi. Untuk menjadi maju, syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (*entrepreneuring government*), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Kemajuan akan berimplikasi pada kemakmuran. Kemakmuran hanya dicapai oleh manusia berkualitas. Oleh karena itu, menciptakan

manusia yang berkualitas adalah tujuan pokok. Sentral dari pembangunan adalah manusia. Kehandalan strategi peningkatan sumber daya manusia akan menjamin terwujudnya penduduk yang berkualitas. Sumber daya manusia berkualitas memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Dengan tingginya kualitas sumber daya manusia akan terjadi proses perberdayaan ekonomi rakyat secara alamiah dalam masyarakat, pada gilirannya akan mendorong kemajuan berbagai sektor pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam semua sektor pembangunan dan elemen pemangku kepentingan akan menjadi penentu terwujudnya daya saing daerah.

Daya saing ditentukan juga oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung dengan kualitas tinggi, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi. Birokrasi pemerintahan visioner harus menjadi faktor pendorong kemakmuran. Pemerintahan daerah menyediakan pembiayaan pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara optimal, dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif dan kreatif.

Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian nonpangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan sumber dari luar negeri. Hasil produksi dari berbagai sektor perekonomian menonjol secara kualitas dan produktifitas. Swasembada menjadi fokus perhatian untuk mengurangi ketergantungan dan kerawanan serta menciptakan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia.

Keswasembadaan dapat dicapai dengan memanfaatkan keunggulan daerah secara maksimal. Selain swasembada, kemakmuran ditentukan juga dengan hadirnya kepastian hukum, etika politik luhur yang menjunjung tinggi budaya demokrasi, ketentraman dan ketertiban, budaya dan etos kerja keras. Dalam proses pembangunan Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota di Lampung harus memastikan keterlibatan penuh dari masyarakat dalam peningkatan perekonomian.

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan distribusi yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah), derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, RPJPD Provinsi Lampung memuat 7 (tujuh) misi, sebagai upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi *direction* untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005-2025, dilaksanakan melalui misi berikut:

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Misi *pertama* RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 adalah menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global. Misi ini sebagai upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki, dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis pertanian terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan kearah ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru pada sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataan harus diorientasikan mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam juga tidak merusak lingkungan.

Misi *kedua* RPJPD adalah membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Misi ini merupakan upaya menambah dan meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi regional dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan sosial, terutama kebutuhan dasar masyarakat juga diorientasikan untuk menarik investasi.

Misi *ketiga* adalah membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Misi ini ditetapkan sebagai upaya memperkuat daya saing sumber daya manusia dengan melaksanakan pendidikan berkualitas pada semua jalur, jenis, dan jenjang. Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEKS diprioritaskan pada semua sektor pembangunan. Pengembangan SDM berkualitas harus didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan keolahragaan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM harus didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.

Misi *keempat* yaitu membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. Misi ini sebagai upaya memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME melalui pendidikan agama yang berkualitas di dalam dan di luar sekolah. Peningkatan pelayanan keagamaan secara luas untuk meningkatkan kualitas pribadi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama perlu diperkuat karakter atau jati diri masyarakat yang mengaktualisasikan budi pekerti luhur dan nilai-nilai luhur budaya daerah serta mampu berinteraksi antar budaya.

Misi *kelima* mewujudkan daerah yang asri dan lestari, sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, serta kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan. Meningkatkan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi. Meningkatkan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dengan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Memberikan keindahan dan

kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman.

Misi keenam, yaitu menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis. Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan kemampuan dan peningkatan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas praktik-praktik birokrasi yang sarat KKN.

Terakhir, misi ketujuh, adalah mewujudkan pemerintah daerah yang bertatakelola baik dan berorientasi kewirausahaan. Misi ini sebagai upaya mewujudkan pemerintahan daerah bertata kelola baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih (bebas KKN), berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional. Dalam kaitan ini perlu diperkuat desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah serta keserasian dan keterpaduan pembagian tugas pelayanan antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mewujudkan pemerintahan daerah yang berorientasi pada kewirausahaan (*entrepreneurial government*) yang mendorong inovasi dalam manajemen pemerintahan untuk pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha.

3.3 Tahapan dan Prioritas

Dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2025, diperlukan penahapan dan prioritas yang dijadikan agenda dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah (RPJMD), yang didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada setiap tahapan. Oleh karena

itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi tetap berkelanjutan dari tahapan ke tahapan berikutnya.

RPJM Kesatu (2005-2009)

Tahap ini ditujukan untuk terbangunnya kerangka dasar kemajuan daerah dalam rangka menopang percepatan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kerangka dasar kemajuan daerah dibangun diatas pendayagunaan potensi sumber daya alam, daya dukung infrastruktur, kualitas sumber daya manusia. Kegiatan pada tahap ini diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan. Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumber daya manusia.

Tahap ini diarahkan pada pemulihan kembali kondisi yang ada, sehingga kemajuan lebih cepat dicapai. Penurunan kemampuan ekonomi untuk tumbuh mengindikasikan adanya infrastruktur yang melemah daya dukungnya serta tidak berfungsinya mekanisme ekonomi secara optimal. Untuk itu, harus ada pemulihan sarana dan prasarana wilayah serta penambahan infrastruktur sehingga meningkatkan daya dukungnya terhadap kinerja ekonomi. Hal ini harus dilakukan secara simultan baik pada skala Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Karenanya harus disegerakan penyiapan rencana tindak pemulihan dan pembangunan infrastruktur.

Mekanisme ekonomi dipulihkan dengan merevitalisasi sektor-sektor ekonomi terutama sektor pertanian dan industri. Revitalisasi pertanian terutama dengan mengoptimalkan kembali fungsi irigasi, meremajakan tanaman perkebunan, dan penerapan teknologi pertanian. Revitalisasi industri dilakukan dengan mengembangkan energi alternatif, menciptakan keterkaitan dan keterpaduan usaha, dan iklim usaha yang sehat (peraturan

dan infrastruktur). Karenanya harus juga disegerakan penyiapan rencana tindaknya terutama pada skala Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada tahap ini diupayakan pemulihan kerusakan lingkungan. Kondisi lingkungan yang baik merupakan kerangka dasar yang menjadi landasan bagi kemajuan. Karena itu, kerusakan hutan, pencemaran sungai dan laut serta penelantaran lahan harus mendapat prioritas penanganan. Pada aspek sosial, diupayakan peletakan dasar-dasar hubungan sosial yang harmoni. Hal ini dibangun melalui membangun rasa aman dan saling percaya. Bersamaan dengan itu, tradisi demokrasi dibangun mulai dari tingkat paling bawah. Penegakan hukum menjadi bagian peletakan kerangka dasar kemajuan. Birokrasi ditata dengan menyiapkan kerangka kerja yang baik dan pemerintahan yang bersih, bebas KKN.

RPJM Kedua (2010-2014)

Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Tahap ini merupakan kelanjutan tahapan sebelumnya, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi.

Tahap ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya melalui mekanisme ekonomi yang sehat, sistem sosial yang padu, tegaknya hukum. Optimalisasi sumber daya dilakukan dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur. Infrastruktur ditingkatkan dalam skala yang tinggi dan meletakkan sistem pengelolaannya yang berkesinambungan. Misalnya, irigasi dijaga fungsinya dengan memelihara jaringan irigasi serta memulihkan dan menjaga fungsi kawasan konservasi (Tanggamus dan Lampung Barat).

Mekanisme ekonomi yang sehat dibangun melalui peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi diperluas dengan diversifikasi dan peningkatan mutu. Misalnya, industri dikembangkan dengan mengolah hasil-hasil pertanian sesuai dengan pohon industrinya sehingga nilai tambahnya dapat ditingkatkan.

Sistem sosial yang padu dicerminkan oleh berkembangnya kelembagaan sosial, tumbuhnya kepedulian sosial, dan meningkatnya pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kehidupan demokrasi makin matang dan dinamika sosial kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan seni budaya. Birokrasi makin meningkat kinerjanya dan penegakan hukum makin meluas dengan tingkat kesadaran hukum dan politik yang makin baik.

RPJM Ketiga (2015-2019)

Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah, mengembangkan kesejahteraan, serta memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala Nasional tapi juga Internasional.

Tahapan ini ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pengetahuan dan taknologi diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya. Pencanangan teknologi dan pengetahuan ini sudah dimulai sejak tahap pertama sebagai bagian pengembangan infrastruktur. Kemajuan yang dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing, yang tercermin pada komoditas infrastruktur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kesejahteraan tercermin pada indeks pembangunan manusia dan social kapital.

RPJM Keempat (2020-2024)

Tahap ini ditujukan pada mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah tersebar merata dan berklasifikasi nasional bahkan banyak yang berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan aksesibilitas yang mudah. Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreatifitas dan seni budaya.

Perekonomian daerah makin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang serta produktifitas yang tinggi dan bardaya saing pada tingkat global. Infrastruktur makin mantap dengan daya dukung yang tinggi serta kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi (berdaya saing). Keanekaragaman hayati bukan hanya untuk dilestarikan, tapi menjadi keunikan daerah yang merupakan ikon pariwisata dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya air terkelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi.

Pemerintahan makin dipercaya masyarakat karena memiliki kinerja yang baik dan bersih. Birokrasi mengedepankan pelayanan publik secara prima yang didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas dan disiplin tinggi. Penegakan hukum makin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Penjabaran visi pembangunan jangka panjang tahap ketiga (2015-2019) tersebut juga sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dengan visi yang senada, yaitu “Lampung Maju dan Sejahtera 2019.”

Pada saat dokumen SIDA ini disusun pada 2018, RPJMD 2015-2019 telah memasuki masa akhir periode berlakunya, dan telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada 27 Juni 2018. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung tengah melakukan review terhadap RPJMD tahap ketiga tersebut, dan diikuti penyusunan naskah teknokratik RPJMD untuk periode lima tahun terakhir (2020-2024) dari RPJPD Provinsi Lampung.

Sesuai dengan penahapan lima tahunan dalam RPJPD tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang berada pada tahap ketiga (2015-2019) dari periode 20 tahun pembangunan jangka panjang, dan segera memasuki tahap terakhir atau tahap keempat (2020-2024) dari RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025. Tahapan ini menjadi krusial, karena menjadi akhir dari periode 20 tahun pembangunan daerah, di mana dalam periode terakhir ini akan dapat diukur dan diketahui tingkat keberhasilan pembangunan jangka panjang yang pertama sejak era reformasi di Provinsi Lampung ini.

Tahap ketiga RPJPD yang akan berakhir pada 2019 ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah, mengembangkan kesejahteraan, serta memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala Nasional tapi juga Internasional. Tahapan ini ditandai makin dominannya peranan pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pengetahuan dan teknologi diarahkan pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya. Pencanangan teknologi dan pengetahuan ini sudah dimulai sejak tahap pertama sebagai bagian pengembangan infrastruktur. Kemajuan yang dicapai menjadikan Provinsi Lampung memiliki daya saing, yang tercermin pada komoditas infrastruktur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Kesejahteraan tercermin pada indeks pembangunan manusia dan sosial kapital.

Secara eksplisit disebutkan capaian tahap ketiga RPJPD ditekankan pada peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kuat diarahkan pada optimalisasi pendayagunaan potensi daerah dalam rangka kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahapan terakhir RPJPD Provinsi Lampung (2020-2024), arah pembangunan ditujukan untuk mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah tersebar merata dan berklasifikasi nasional bahkan banyak yang berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan aksesibilitas yang mudah. Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas, dan seni budaya.

Pada tahap ini, perekonomian daerah makin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang serta produktifitas yang tinggi dan daya saing pada tingkat global. Infrastruktur makin mantap dengan daya dukung yang tinggi serta kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi (berdaya saing). Keanekaragaman hayati bukan hanya untuk dilestarikan, tapi menjadi keunikan daerah yang merupakan ikon pariwisata dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya air terkelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi.

Pemerintahan juga makin dipercaya masyarakat, karena memiliki kinerja yang baik dan bersih. Birokrasi mengedepankan pelayanan publik secara prima yang didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas dan disiplin tinggi. Penegakan hukum makin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak

hukum yang berwibawa serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

3.4. Kondisi SIDA yang Akan Dicapai

Kondisi SIDA yang hendak dicapai menggambarkan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung, dengan arah penguatan SIDA berdasarkan strategi yang dipilih, dengan target capaian indikator kinerja. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD. Sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Penguatan SIDA Provinsi Lampung, berdasarkan kajian berbagai potensi yang ada, telah dirumuskan klaster tematik yaitu “Agro-Ekowisata Provinsi Lampung,” dengan klaster unggulan agrobisnis tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan kerajinan rakyat dengan. Kerangka kawasan yang menjadi kutub pertumbuhan sebagai penggerak ekonominya meliputi; Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Pasawaran, Tanggamus, Lampung Barat, dan wilayah hinterlandnya.

Beberapa konsep dan istilah mengenai agrobisnis dapat dijelaskan dalam rangka mendukung pengembangan klaster tematik Agro-Ekowisata Provinsi Lampung yaitu:

a) Klaster Holtikultura:

Hortikultura merupakan bagian penting dari pangan dan mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi. Tidak saja buah dan sayuran,

tapi juga tanaman hias. Mulai dari daya saing buah tropika, peran buah dan sayuran sebagai pangan fungsional untuk kesehatan, komersialisasinya, teknologi budidaya hortikultura dikaitkan dengan perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Termasuk bagaimana tantangan dan peluang usaha florikultura untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pentingnya hortikultura untuk pengembangan *green city* bagi kehidupan dan lingkungan kita

Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap pelaku agrobisnis hortikultura dituntut meningkatkan daya saing produk hortikultura yang dihasilkannya. Daya saing produk dapat ditelaah dari berbagai aspek; mulai dari mutu produk yang lebih baik, harga jual yang lebih rendah, desain dan kemasan yang lebih menarik, sampai pada pelayanan purna jual yang lebih terjamin. Inovasi secara berkesinambungan memungkinkan pelaku agrobisnis meningkatkan daya saing produk hortikultura yang dihasilkannya.

Melalui inovasi akan terjadi perbaikan-perbaikan dalam proses produksi, baik melalui adopsi teknologi maju di luar perusahaan, maupun melalui penelitian dan pengembangan dalam perusahaan sendiri. Hal demikian dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik berupa peningkatan kualitas produk, peningkatan desain produk, atau peningkatan efisiensi produksi. Setiap inovasi produk harus selalu diarahkan kepada kebutuhan pelanggan. Inovasi tanpa memperhatikan kebutuhan pelanggan dapat mengakibatkan kegagalan dalam pemasaran produk yang dihasilkan. Sembilan sistem inovasi sesuai dengan segmentasi sistem agrobisnis, yaitu: (a) pengelolaan sumber daya, (b) sistem produksi, (c) pasca panen/pengolahan, (d) logistik/distribusi, (e) pengelolaan lingkungan, (f) pemasaran hasil, (g) inovasi kelembagaan, (h) dukungan manajemen, dan (i) blok program.

b). Perkebunan

Pengertian dan definisi yang digunakan dalam Buku Pembakuan Statistik Perkebunan 2007 mengacu pada UU No 18 Tahun 2004 mengenai Perkebunan serta Buku Konsep dan Definisi Baku Statistik Pertanian (BPS), perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kakao, kelapa, dan teh. Secara bahasa, “perkebunan” dapat mencakup *plantation* dan *orchard*. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang dipasarkannya. Namun, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Ciri yang lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.

c) Agrobisnis Perikanan

Menurut UU Nomor 31 Tahun 2004, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.

d) **Klaster Kerajinan Rakyat**

Kerajinan rakyat merupakan usaha yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan (kerajinan tangan) yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Kerajinan yang dibuat biasanya dengan berbagai macam bahan. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau benda seni maupun barang pakai. Biasanya istilah ini diterapkan untuk cara tradisional dalam membuat barang-barang.

Kerajinan terdiri dari 2 jenis yaitu:

1. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam atau bahan dasarnya bahan-bahan alam seperti: serat, bambu, rotan, kayu.
2. Kerajinan bahan buatan merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan buatan seperti: plastik, gips, sabun, lilin, logam dll.

Kerajinan tangan juga bisa terbuat dari barang - barang bekas seperti botol bekas, kardus, dan plastik makanan. Jiwa kewirausahaan dibutuhkan untuk sebuah inovasi baru dalam pengembangan kerajinan rakyat. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai proses kemanusiaan (*human process*) yang berkaitan dengan adanya kreativitas serta inovasi dalam memahami suatu peluang, mengorganisasi sumberdaya, mengelola atau manajemen, sehingga peluang itu dapat terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba ataupun nilai untuk jangka waktu yang lama.

d) **Pengembangan Ekowisata**

Ekowisata atau *ecotourism* merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Secara umum objek kegiatan

ekowisata tidak jauh berbeda dari kegiatan wisata alam biasa, namun memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap objek wisatanya.

Pengembangan agrowisata terkait erat dengan masyarakat di sekitar kawasan agrowisata. Masyarakat lokal berperan besar dalam keberhasilan agrowisata. Menurut Laverack dan Thangphet (2009), dalam Dwiridotjahjono dkk (2017), keterlibatan masyarakat dan pemberdayaannya juga merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan rakyat yang selama ini dinilai relatif lemah, serta sekaligus akan membantu pemerintah dalam memerangi terjadinya *urban sprawl* yang selama ini belum ada cara ampuh untuk mengatasinya. Peran masyarakat lokal dalam mendukung pengembangan agrowisata dapat dilakukan melalui penyediaan akomodasi, kantin, transportasi, kerajinan tangan dan aneka oleh-oleh, serta jenis layanan lainnya.

Meski banyak sisi positif, pengembangan agrowisata juga menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi, seperti hilangnya sumber daya alam yang bernilai, rendahnya keterampilan pengelolaan, pemasaran, dan kewirausahaan, serta kurangnya rasa memiliki warga lokal terhadap objek agrowisata, juga ketergantungan terhadap sumber dana dari luar. Jenis kegiatan ekowisata yang potensial dikembangkan di Provinsi Lampung antara lain kegiatan sektor wisata pantai, kesenian dan budaya, minat khusus pegunungan, wisata belanja, kerajinan, wisata alam, dan wisata buatan.

Kegiatan pariwisata yang direncanakan menjadi andalan adalah wisata alam dan wisata minat khusus. Pengembangan kegiatan wisata alam diarahkan dikembangkan di Selat Lampung, Teluk Kiluan, Pelabuhan Bakauheni, dan Pelabuhan Bengkurat, Taman Nasional Bukit Barisan, Bandar Lampung, Pasawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, serta daerah-daerah pendukungnya. Uraian arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran yang

ditetapkan yang dapat menunjang penguatan SIDA dapat dijabarkan pada Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1. Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai Provinsi Lampung

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDA	Kerangka Kebijakan Inovasi	Indikator Target Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pilar 1 : Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	<p>Terbitnya Perda atau peraturan lain yang mendukung untuk operasionalisasi penguatan SIDA Provinsi Lampung</p> <p>Terbangunnya basis data inovasi yang inklusif</p> <p>Terbangunnya lembaga pendidikan menengah kejuruan unggulan yang mendukung hilirisasi dan inovasi berbasis produk unggulan daerah</p> <p>Terbangunnya sistem perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel, dan kompetitif</p> <p>Terbangunnya Ruang Publik Kreatif (RPK) sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas warga, interaksi antar masyarakat, dan memenuhi ruang terbuka hijau</p>

			Meningkatnya alokasi APBD untuk program/kegiatan pengembangan Iptekin dan Litbang
		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin), Litbang dan perekayasaan (Litbangyasa), serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Berfungsinya kelembagaan penguatan Sistem Inovasi Daerah
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Iptekin dan Litbangyasa
			Meningkatnya daya serap masyarakat terhadap Iptekin (difusi Iptekin).
			Meningkatnya absorpsi Iptekin dalam industri, khususnya UMKM
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Kaidah-kaidah Penguatan SIDA sudah tersosialisasi di seluruh aktor di daerah
			Terbangun jejaring Iptekin dan Litbangyasa antarpemangku kepentingan
			Berkembangnya aktivitas masyarakat di Ruang Publik Kreatif
			Berperannya pelayanan teknologi di Kabupaten/Kota dalam mendifusikan Iptekin (teknologi tepat guna) dan hasil Litbangyasa di masyarakat
		Elemen 4: Budaya inovasi	Berjalannya apresiasi terhadap kegiatan pengembangan Iptek, kreativitas, dan inovasi
			Berperannya agen inovasi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah

			Munculnya budaya menciptakan kesempatan/lapangan kerja (<i>entrepreneurship</i>) dari pendidikan menengah
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Berjalannya kerja sama/siner- gi antar daerah di Provinsi Lampung bagi pembangunan daerah yang lebih optimal
			Berjalannya kerja sama antara pusat dengan Provinsi Lampung secara optimal bagi percepatan pembangunan daerah
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Meningkatnya kesetaraan gender
			Meningkatnya kesadaran ma- syarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan
			Terbangun pemahaman dan keselarasan dengan era industri 4.0 di kalangan aktor inovasi
			Meningkatnya kesadaran Hak Kekayaan Intelektual di ma- syarakat
			Tersedianya fasilitas untuk masyarakat di ruang publik dan kantor pemerintah berbasis gender
2	Pilar 2: Penguatan Klaster Industri	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis (industrialisasi inovasi)	Berfungsinya kelembagaan pengelola pengembangan klaster pada kawasan holti- kultura & kerajinan rakyat, perikanan, perkebunan ber- basis ekowisata

			Terbitnya Peraturan Gubernur bagi pengembangan klaster industri prioritas daerah
			Terlaksananya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) dan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Provinsi Lampung
			Meningkatnya kualitas infrastruktur untuk akses objek wisata pada kawasan holtikultura & kerajinan rakyat, perikanan dan perkebunan berbasis ekowisata
			Berkembangnya operator wisata pada kawasan holtikultura & kerajinan rakyat, agrobisnis perikanan dan perkebunan berbasis ekowisata yang profesional
			Berkembangnya fasilitas akomodasi, kesehatan, kuliner, dan <i>merchandise</i> dengan memenuhi standar fasilitas wisata nasional maupun internasional
			Tersedianya pusat informasi kepariwisataan Provinsi Lampung yang profesional dan modern
			Tersedia dan terlaksana Rencana Induk Pengembangan Kawasan Agropolitan
			Berkembangnya aktivitas ekonomi integrasi klaster holtikultura, kerajinan rakyat, perikanan, dan perkebunan.

		<p>Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin), penelitian, pengembangan dan perekayasaan (Litbangyasa), serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>Tersedianya pasokan Iptekin untuk integrasi klaster holtikultura kerajinan rakyat, agrobisnis perikanan dan perkebunan</p>
			<p>Tersedianya pasokan Iptekin industri holtikultura agrobisnis perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat</p>
			<p>Meningkatnya daya serap Iptekin pelaku industri holtikultura agrobisnis perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) serta kerajinan rakyat</p>
			<p>Tersedianya pasokan Iptekin industri pariwisata pada kawasan holtikultura agrobisnis perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata</p>
			<p>Meningkatnya daya serap Iptekin pelaku industri pariwisata pada kawasan holtikultura agrobisnis perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata</p>
		<p>Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi</p>	<p>Optimalnya interaksi antara para pemangku kepentingan di industri holtikultura agrobisnis perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat dengan pemasok Iptekin</p>

			Optimalnya interaksi antara para pemangku kepentingan di industri pariwisata dengan pemasok iptekin
		Elemen 4: Budaya inovasi	Berkembangnya budaya inovasi di industri holtikultura agrobisnis perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>), kerajinan rakyat, dan sektor UMKM
			Berkembangnya budaya inovasi di industri pariwisata
			Harmonisnya hubungan sosial pelaku bisnis dan lingkungan
		Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Menguatnya rantai nilai pada klaster holtikultura, agrobisnis perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>), serta kerajinan rakyat sampai pada tingkat indikator kinerja produktivitas klaster industri.
			Menguatnya rantai nilai pada klaster industri pariwisata di kawasan holtikultura agrobisnis perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>), serta kerajinan rakyat berbasis ekowisata
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	Aktifitas klaster industri holtikultura agrobisnis perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat telah memenuhi kaidah kelestarian lingkungan;

			Aktifitas klaster industri pariwisata berstandar internasional
3	Pilar 3: Penguatan Jaringan Inovasi	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Perizinan bagi pembangunan Kawasan agrobisnis hortikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata di Provinsi Lampung yang transparan, efektif, dan efisien
			Terbitnya peraturan tentang kawasan agrobisnis hortikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat di Provinsi Lampung
			Tersusunnya peraturan dan AMDAL zonasi
			Tersusunnya DED kawasan dan dimulainya (<i>ground breaking</i>) pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan; beroperasinya kawasan pendidikan dan industri
		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM	Tersedianya Pusat Litbangyasa dan/atau jejaring kelembagaan penguatan dan pengembangan Iptekin di Provinsi Lampung
Terbangunnya lembaga pendidikan di kawasan agrobisnis hortikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata			

			<p>Terbangunnya pengguna Ip- tekin di kawasan agrobisnis holtikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off- farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata</p>
			<p>Meningkatnya jumlah HKI terdaftar (per 10.000 penduduk)</p>
		<p>Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi</p>	<p>Terbentuknya lembaga pengelola kawasan agrobisnis holtikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata;</p>
			<p>Terbangunnya pusat belajar masyarakat berupa <i>telecenter</i> atau <i>Broadband Learning Center (BLC)</i> di kawasan agrobisnis holtikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata;</p>
			<p>Terbangunnya jaringan yang menghubungkan antara pusat inovasi di Kawasan agrobisnis holtikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata dengan simpul- simpul pelayanan teknologi di kecamatan dan desa serta dengan simpul Ip- tekin di luar Provinsi Lampung.</p>
		<p>Elemen 4: Budaya inovasi</p>	<p>Berkembangnya budaya berjejaring antara aktor inovasi</p>

		<p>Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah</p> 	<p>Terbangunnya kerja sama antarkawasan agrobisnis holtikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata Provinsi Lampung dengan pelaku asosiasi dalam bidang agrobisnis dan asosiasi pengembangan kerajinan rakyat ditingkat lokal, nasional maupun internasional</p>
			<p>Terbangunnya sinergitas antara agrobisnis holtikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat Provinsi Lampung dengan pusat-pusat unggulan (<i>center of excellence</i>) di zona-zona ekonomi strategis</p>
			<p>Meningkatnya produk bersertifikasi</p>
			<p>Meningkatnya jumlah pertemuan ilmiah skala nasional dan internasional</p>
			<p>Meningkatnya kesadaran HKI.</p>
<p>4</p>	<p>Pilar 4: Penguatan Teknopreneur</p>	<p>Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis</p>	<p>Tersedianya bantuan fasilitasi kredit UMKM yang fokus pada agrobisnis holtikultura perikanan dan perkebunan (<i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i>) dan kerajinan rakyat berbasis ekowisata</p>
			<p>Tersedianya skema pembiayaan bagi pengembangan bisnis inovatif.</p>
			<p>Adanya insentif dari Pemda untuk pengembangan wirausaha berbasis inovasi (enteprenuer)</p>

		<p>Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/ atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (Litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	Terbentuknya kelembagaan pusat inovasi
			Meningkatnya kapasitas absorpsi Iptekin UMKM;
			Meningkatnya inisiatif berwirausaha berbasis Iptekin dari kalangan pemuda
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Meningkatnya jumlah UMKM berbasis kreatifitas dan inovasi di Provinsi Lampung.
		Berkembangnya kerja sama antara penghasil teknologi tepat guna dan UMKM	
Elemen 4: Budaya inovasi	Berkembangnya budaya menciptakan kesempatan/ lapangan kerja di kalangan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi		
Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Berkembangnya jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri prioritas daerah		
		<p>Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global</p>	Produk dari bisnis inovatif terstandar, baik nasional maupun internasional
			Terjalinnnya kerja sama internasional dalam pengembangan bisnis inovatif

5	Pilar 5: Pengembangan Tematik Daerah	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Tersedianya rencana induk dan pedoman/ panduan <i>green innovation development (GID)</i> mencakup energi bersih, air bersih, transpor- tasi, informasi & komunikasi dan lingkungan
		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/ atau penelitian, pengem-bangan dan perekayasaan (Litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Terbangunnya kelembagaan yang menangani pengembangan <i>Green Innovation Development (GID)</i> di Provinsi Lampung
			Meningkatnya pasokan Iptekin air bersih, telekomunikasi dan informasi, energi, transportasi, dan lingkungan
			Meningkatnya kapasitas absorpsi masyarakat terhadap Iptekin air bersih, telekomunikasi dan informasi, energi, transportasi, dan lingkungan air bersih
		Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	Terbangunnya interaksi pengembangan <i>green innovation development (GID)</i>
			Meningkatnya kerja sama Litbangyasa energi, air bersih, informasi dan komunikasi, transportasi dan lingkungan
		Elemen 4: Budaya inovasi	Meningkatnya interaksi dan komunitas GID
			Meningkatnya penerapan GID dalam kurikulum pendidikan

		<p>Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah</p>	<p>Terbitnya kebijakan-kebijakan daerah dalam pembangunan hijau (energi, air bersih, transportasi, informasi & komunikasi, dan lingkungan)</p>
		<p>Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global.</p>	<p>Terbangunnya kerja sama internasional dalam pembangunan hijau infrastruktur (energi, air bersih, transportasi, informasi & komunikasi, dan lingkungan).</p>



**BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**



BAB IV



STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA

4.1. Strategi Penguatan SIDA

Strategi yang digunakan untuk penguatan SIDA dikembangkan dari pilar-pilar strategis penguatan sistem inovasi, yang terdiri atas:

1. Prakarsa Penguatan SIDA

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian pada tingkat daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional serta untuk membangun ekosistem bagi berkembangnya inovasi dan bisnis sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

2. Pengembangan Klaster Industri

Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi terbaik sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing industrial sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

3. Pengembangan Jaringan Inovasi

Strategi ini sebagai wahana untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antaraktor, serta mendinamisasikan aliran pengetahuan,

inovasi, difusi, serta pembelajaran sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

4. Pengembangan Teknopreneur

Strategi ini sebagai wahana modernisasi bisnis/ekonomi, sosial, serta pengembangan budaya sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

5. Pengembangan Pilar-Pilar Kebijakan Tematik

Strategi ini bertujuan memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem inovasi yang bersifat tematik dan kontekstual sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

4.2. Arah Kebijakan Penguatan SIDA

Arah kebijakan penguatan SIDA adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan SIDA. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya. Arah kebijakan dibuat dalam beberapa tahap (setiap tahun). Arah kebijakan penguatan SIDA menggunakan enam elemen Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI), yaitu:

1. Mengembangkan kerangka umum kebijakan inovasi dan bisnis;
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin); penelitian, pengembangan dan perekayasaan (Litbangyasa); serta kemampuan absorpsi Iptekin dalam industri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik (*good/best practice*), dan/atau hasil Litbangyasa;
4. Membangun budaya inovasi di daerah;
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan inovasi di daerah;

6. Meningkatkan penyesuaian dengan perkembangan global.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 disebutkan tujuh arah pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang dicita-citakan, yaitu:

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.
2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik.

Sesuai dengan penahapan lima tahunan dalam RPJPD tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang berada pada tahap ketiga (2015-2019) dari periode 20 tahun pembangunan jangka panjang, dan segera memasuki tahap terakhir atau tahap keempat (2020-2024) dari RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025. Tahapan ini menjadi krusial, karena menjadi akhir dari periode 20 tahun pembangunan daerah, di mana dalam periode terakhir ini akan diukur dan diketahui tingkat keberhasilan pembangunan jangka panjang yang pertama sejak era reformasi di Provinsi Lampung ini.

Tahap ketiga RPJPD yang akan berakhir pada 2019 ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah, mengembangkan kesejahteraan, serta

memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional tapi juga internasional.

Tahapan ini ditandai dengan makin dominannya peranan pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pengetahuan dan teknologi diarahkan pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya. Pencanangan teknologi dan pengetahuan ini sudah dimulai sejak tahap pertama sebagai bagian pengembangan infrastruktur. Kemajuan yang dicapai menjadikan Provinsi Lampung memiliki daya saing tinggi, yang tercermin pada komoditas infrastruktur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kesejahteraan tercermin pada indeks pembangunan manusia (*human development index*) dan modal sosial (*social capital*).

Secara eksplisit disebutkan capaian tahap ketiga RPJPD ditekankan pada peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin kuat, diarahkan pada optimalisasi pendayagunaan potensi daerah dalam rangka kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahapan terakhir RPJPD Provinsi Lampung (2020-2024), arah pembangunan ditujukan untuk mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat makin mantap yang tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik serta terwujudnya rasa nyaman. Sekolah tersebar merata dan berklasifikasi nasional bahkan banyak yang berklasifikasi internasional. Pelayanan kesehatan juga tersebar dengan aksesibilitas yang mudah. Kehidupan sosial semakin dinamis dan stabil yang mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas, dan seni budaya.

Pada tahap ini, perekonomian daerah makin kokoh dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang serta produktifitas yang tinggi dan bardaya saing pada tingkat global. Infrastruktur makin mantap dengan daya dukung yang tinggi serta kualitas

sumber daya manusia yang semakin tinggi (berdaya saing). Keanekaragaman hayati bukan hanya untuk dilestarikan, tapi menjadi keunikan daerah yang merupakan ikon pariwisata dan kegiatan ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya air terkelola dengan baik dan menjadi kekuatan dalam menjaga momentum kemajuan ekonomi.

Pemerintahan juga makin dipercaya masyarakat, karena memiliki kinerja yang baik dan bersih. Birokrasi mengedepankan pelayanan publik secara prima yang didukung oleh manajemen pemerintahan yang baik, aparatur yang berkualitas dan disiplin tinggi. Penegakan hukum makin mantap dengan perangkat aturan yang handal dan aparatur penegak hukum yang berwibawa serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Arah kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Penentuan arah kebijakan memberikan gambaran prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini terkait dengan fungsi kelitbangan. Sesuai arah perencanaan pembangunan jangka panjang dan pentahapan jangka menengah lima tahunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RPJPD Provinsi Lampung, penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Lampung diarahkan pada:

1. Penguatan infrastruktur serta kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan ekonomi.
2. Perluasan dan penguatan jaringan inovasi untuk memperkokoh struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang serta produktifitas yang tinggi dan daya saing pada tingkat global.
3. Penguatan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima didukung manajemen pemerintahan yang baik, serta aparatur yang berkualitas dan berkompeten.

4. Peningkatan peran sistem inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah.
5. Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sosial-ekonomi yang semakin dinamis dan stabil dengan mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas, dan seni-budaya.

Tabel 4.1.

Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan SIDA Provinsi Lampung

Visi : “ Lampung Maju dan Sejahtera ”		
No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Penguatan infrastruktur serta kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan ekonomi.	Menggali dan mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan, pariwisata, dan kerajinan rakyat.
		Peningkatan fungsi dan peran kluster komoditi di kawasan Agro-Ekowisata.
		Pembangunan dan operasionalisasi Ruang Publik Kreatif (RPK).
		Peningkatan penerapan teknologi pengolahan hasil pascapanen pertanian
		Penguatan perekonomian desa melalui BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya.
		Mengembangkan kewirausahaan dalam sistem pendidikan.
		Pembinaan kelembagaan petani.
2	Perluasan dan penguatan jaringan inovasi untuk memperkuat struktur ekonomi yang bertumpu pada beberapa sektor secara berimbang serta produktifitas yang tinggi dan bardaya saing pada tingkat global.	Diseminasi pemanfaatan teknik budidaya dengan produktivitas tinggi yg berkelanjutan.
		Fasilitasi pola kemitraan antara unsur-unsur SIDA dan pelaku usaha serta penyediaan informasi pasar dan pasokan.

		<p>Peningkatan daya saing (kualitas dan keberagaman produk), serta penyediaan sarana dan prasarana produksi industri kecil-menengah.</p>
		<p>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi ketenagakerjaan.</p>
		<p>Meningkatkan ketersediaan dokumen kajian pendukung perencanaan pembangunan daerah.</p>
		<p>Fasilitasi akses informasi pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.</p>
		<p>Penguatan industri kerajinan rakyat.</p>
		<p>Pengembangan jaringan promosi wisata daerah.</p>
		<p>Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi potensi penanaman modal daerah (gelar potensi daerah, <i>gathering</i>).</p>
<p>3.</p>	<p>Penguatan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang prima didukung manajemen pemerintahan yang baik, serta aparatur yang berkualitas dan berkompeten.</p>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, perizinan).</p>
		<p>Fasilitasi sarana prasarana pengolahan komoditi unggulan daerah.</p>
		<p>Peningkatan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja (BLK).</p>
		<p>Mengembangkan dan membangun pusat-pusat wisata unggulan.</p>
		<p>Menguatkan SDM pariwisata melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan.</p>
		<p>Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.</p>
		<p>Fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.</p>
		<p>Penyediaan informasi dan akses informasi potensi penanaman modal daerah.</p>

		Fasilitasi diklat aparaturnya bidang Litbang, penanaman modal, dan pelayanan publik.
		Peningkatan akses, kemudahan, dan keamanan investasi di daerah.
		Penyediaan sistem investasi yang handal di daerah.
		Tersedianya informasi potensi daerah sumber daya yang terkait dengan investasi.
		Meningkatkan struktur, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penanganan bangunan jalan dan pelengkap jalan di kawasan Agro-Ekowisata.
		Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan di kawasan Agro-Ekowisata.
		Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi massal yang layak dan efisien.
		Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan dalam pemanfaatan penggunaan lahan sesuai dengan arahan pola maupun struktur ruang.
		Penyusunan dan pemanfaatan sistem informasi layanan publik, aplikasi perizinan dan meningkatkan SDM pelayanan perizinan.
4.	Peningkatan peran sistem inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi, dan peningkatan daya saing daerah.	Pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal.
		Bimbingan teknis bagi para pelaku industri kecil menengah dan petani.
		Membangun jejaring inovasi dan sentra industri lokal.
		Membangun model kemitraan antara pelaku utama industri dan UMKM.

		<p>Penyediaan informasi pasar dan pasokan bagi UMKM.</p> <p>Meningkatkan pemasaran dan jaringan pariwisata daerah.</p> <p>Penguatan kelembagaan dan peningkatan daya saing produk UMKM.</p> <p>Fasilitasi peluang pangsa pasar dan kemitraan UMKM.</p> <p>Fasilitasi akses permodalan dan pasar bagi koperasi.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.</p>
5.	<p>Penguatan peran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan sosial-ekonomi yang semakin dinamis dan stabil dengan mendorong berkembangnya kelembagaan sosial, kreativitas, dan seni-budaya.</p>	<p>Mengembangkan jiwa kewirausahaan pada lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.</p> <p>Penguatan terhadap kelompok dan pelaku seni dan budaya lokal.</p> <p>Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap inovasi, seni, dan budaya lokal.</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana untuk berkembangnya kreativitas dan apresiasi seni masyarakat.</p> <p>Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat di kawasan agrobisnis.</p> <p>Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.</p> <p>Peningkatan sosialisasi peran dan fungsi kelembagaan ekonomi (koperasi).</p> <p>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengguna komunikasi dan informatika serta partisipasi aktif kelompok informasi masyarakat.</p> <p>Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.</p>



BAB V



FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SIDA

5.1. Fokus Penguatan SIDA

Fokus penguatan SIDA merupakan uraian rinci dari setiap elemen Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI). Penjabaran dari setiap elemen KKI tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun program prioritas penguatan SIDA. Berikut fokus setiap KKI :

1. Elemen 1: Fokus pengembangan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis, mencakup:
 - a. Pengembangan basis data (indikator penting) inovasi dan bisnis;
 - b. Pengembangan regulasi yang kondusif;
 - c. Besaran investasi bidang Iptekin;
 - d. Perbaikan pelayanan publik;
 - e. Pengadaan pemerintah yang pro bisnis inovatif;
 - f. Pengembangan infrastruktur dasar inovasi dan bisnis;
 - g. Pemberian insentif untuk inovasi dan bisnis.
2. Elemen 2 : Fokus penguatan kelembagaan dan daya dukung Iptekin, Litbangyasa, serta absorpsi Iptekin dalam industri khususnya UMKM, mencakup :
 - a. Pengembangan dan penguatan kelembagaan IPTEKIN;

- b. Pengembangan daya dukung IPTEKIN;
 - c. Pengembangan daya absorpsi IPTEKIN UMKM.
3. Elemen 3 : Fokus penumbuhkembangan kolaborasi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik, dan/atau hasil Litbangyasa, mencakup :
- a. Pengembangan/penguatan kelembagaan kolaborasi;
 - b. Peningkatan difusi inovasi, praktek baik, dan hasil-hasil kelitbang;
 - c. Pengembangan/penguatan pelayanan berbasis teknologi.
4. Elemen 4 : Fokus dalam mendorong budaya inovasi, mencakup :
- a. Pengembangan/penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi;
 - b. Penguatan kohesi sosial;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kreativitas keinovasian;
 - d. Pengembangan apresiasi dan kampanye inovasi;
 - e. Penciptaan usaha baru yang inovatif.
5. Elemen 5 : Fokus penumbuhkembangan dan penguatan keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah, meliputi :
- a. Penguatan/pengembangan prakarsa terpadu sistem inovasi;
 - b. Pengembangan/penguatan koordinasi kebijakan daerah, dan daerah nasional;
 - c. Pengembangan/penguatan kelembagaan khusus.
6. Elemen 6 : Fokus penyelerasan dengan perkembangan global terbagi atas :
- a. Pengembangan kelestarian lingkungan atau prakarsa inovasi / teknologi hijau;
 - b. Pengembangan/penguatan penerapan pengukuran, standardisasi, pengujian, dan penjaminan kualitas (*measurement, standardization, testing, and quality assurance* (MSTQ));
 - c. Pengembangan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

- d. Peningkatan kepedulian terhadap isu-isu dan penyesuaian dengan dinamika internasional yang relevan (seperti ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain);
- e. Pengembangan *regional branding* dan/atau posisi daerah dalam konstelasi global.

5.2. Program Prioritas Penguatan SIDA

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Kepala Daerah terpilih yang di dalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis, yang dirumuskan berdasarkan kebijakan umum dan indikator kinerja (*outcome*) yang ditetapkan.

Kinerja atau performa pelaksanaan program prioritas, baik secara strategis maupun operasional, merupakan tanggung jawab SKPD terkait. Namun, untuk program prioritas yang dikategorikan strategis, merupakan tanggung jawab bersama SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan program strategis, program dan kegiatan dalam kaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan secara rutin, tidak langsung terkait dengan upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Artinya, penetapan prioritas strategis pada beberapa urusan dalam rangka mendukung visi, misi, serta program pembangunan, tidak dengan meninggalkan urusan wajib lain. Perumusan program strategis daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan melalui evaluasi sistematis terhadap capaian kinerja pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan pembangunan dalam seluruh urusan wajib dan pilihan.

Demikian pula dalam bingkai penguatan SIDA, dengan tema “Agroekowisata Provinsi Lampung,” yang menitikberatkan pada kawasan daerah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh pemangku kepentingan. Seluruh SKPD seyogianya mendukung dalam bentuk program dan kegiatan, sehingga mampu mewujudkan kawasan unggulan Agroekowisata di Provinsi Lampung yang mampu bersaing pada tingkat nasional maupun internasional.



**BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**



BAB VI



RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA

6.1. Sinergi Potensi Daerah

Era otonomi daerah telah menyuburkan paradigma pembangunan yang terpisah diantara daerah-daerah otonom. Masing-masing daerah condong mengedepankan kepentingan pembangunan daerahnya, tanpa menenggang kepentingan daerah lain. Egokedaerahan menjadi suatu kecenderungan pola atau model pembangunan yang mewarnai dan memengaruhi perilaku pemerintahan di daerah-daerah otonom. Koordinasi dan sinergi pembangunan antardaerah menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Kecuali kompromi-kompromi terhadap masalah-masalah tertentu yang harus melibatkan otoritas daerah lain. Lebih dari itu, sulit membangun sinergi antardaerah.

Sinergi tidak sama dengan kompromi. Dalam sebuah kompromi, setiap pihak akan kehilangan sesuatu. Sinergi tidak hanya menyelesaikan masalah dan mengatasi sebuah konflik. Sinergi melampaui konfliknya. Dalam sinergi, kita melangkah melampauinya untuk menjangkau sesuatu yang baru, sesuatu yang menggerakkan semua pihak dengan arah baru dan melahirkan perubahan. Sinergi lebih dari penggabungan dua perspektif yang berbeda. Sinergi adalah cara baru milik semua (Covey, 15:2011).

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) memberikan kerangka sinergi dalam pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan berbasis inovasi. Sinergi yang dibangun melalui SIDa melibatkan para pihak terkait, baik dari unsur akademisi, pelaku bisnis, pemerintahan, serta komunitas masyarakat. Pada tingkat kabupaten dan kota, SIDa juga menjadi kerangka dalam membangun sinergi potensi-potensi desa/kelurahan dan kecamatan yang ada di dalam wilayahnya. Begitu pula pada tingkat provinsi, SIDa memberikan konsep pembangunan yang mengintegrasikan potensi daerah-daerah kabupaten/kota yang ada di dalam provinsi bersangkutan. Karenanya, pada level nasional, pemerintah pusat juga membangun konsep Sistem Inovasi Nasional (SINas). Sayangnya, penerapan konsep sisten inovasi yang dilakukan di banyak daerah saat ini belum melahirkan *best practices* sinergi pembangunan yang ideal.

SIDa Provinsi Lampung dibangun dengan landasan paradigma tersebut. Dalam era industri 4.0 saat ini, sinergi menjadi satu prasyarat untuk mampu bersaing. Kemajuan teknologi dan alat-alat produksi telah mampu mengatasi permasalahan geografis dan keterbatasan fisik daerah; juga meningkatkan proses pengelolaan potensi daerah. Dalam era yang mementingkan kekuatan membangun jaringan saat ini, egokedaerahan juga hendaknya bisa diatasi karena tidak relevan lagi. Provinsi Lampung memiliki peran strategis untuk melahirkan pembangunan yang sinergis diantara 15 kabupaten dan kota yang ada. Potensi dan sumber daya pembangunan provinsi tentu berada tersebar di kabupaten dan kota. Akumulasi pengelolaan potensi dan sumber daya pembangunan di kabupaten/kota akan merefleksikan performa pembangunan pada tingkat provinsi. Melalui kerangka SIDa ini, potensi kabupaten/kota disinergikan dalam sebuah konsep pembangunan yang terintegrasi. Bagaimana mengelola potensi dan sumber daya daerah dari sekadar sebagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Hasil analisis faktor multidimensional dengan data primer yang diperoleh melalui FGD dan kuesioner melibatkan para pemangku kepentingan di Provinsi Lampung, ditentukan zonasi ekonomi, Iptek, sosial, budaya yang terintegrasi dalam kawasan strategis mengacu Model Kohesivitas Multidimensional (Harmono: 2016), yaitu: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, serta kabupaten-kabupaten lain sebagai pendukungnya. Tema integrasi pembangunan dalam zonasi SIDA tersebut adalah “Agroekowisata Lampung.” Agroekowisata diartikan sebagai wisata alam (*ecotourism*) berbasis pertanian dalam pengertian yang luas.

Ekowisata juga dimaknai aktivitas ekonomi (industri, perdagangan, jasa) dalam bidang agrobisnis pertanian tanaman bahan makanan dan hortikultura sebagai basis pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung. Ekologi dalam bidang agrobisnis pertanian menjadi basis pengembangan pariwisata, yang dikembangkan dengan menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan sumber daya manusia, religiusitas, sosial, budaya, juga kearifan lokal lainnya.

Dalam SIDA periode ini, daerah yang menjadi kutub pertumbuhan utama adalah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro. Potensi kabupaten/kota lain dikembangkan sebagai penunjang. Zonasi kutub-kutub pertumbuhan tersebut dikelola dengan pendekatan aglomerasi ekonomi yang mempertimbangkan posisi strategis, pasar, keunggulan komparatif, sumber daya manusia, Iptek, sentra industri (klaster), dan potensi pariwisata. Zonasi kutub pertumbuhan akan terus diperluas, dengan model aglomerasi yang terus diperbarui, sehingga mencakup semua wilayah di Provinsi Lampung.

Dari hasil analisis faktor multidimensional yang dilakukan secara partisipatif, diketahui posisi dan potensi masing-masing daerah. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung merupakan wilayah pertumbuhan kawasan strategis pusat kegiatan ekonomi. Di daerah tersebut, kondisi infrastruktur jalan dan irigasi bersinggungan dengan kawasan strategis nasional. Lampung Timur dan Kota Metro termasuk di dalamnya. Di Lampung Selatan, Pesawaran, dan Bandar Lampung terdapat potensi unggulan yang menjadi daya saing daerah, seperti hasil pertanian (kopi, lada, tebu, karet, damar, kakao, sawit, ikan, rempah, ternak, dll), juga potensi pariwisata alam dan wisata bahari.

Kawasan transit antardaerah, serta pusat pemasaran hasil produksi, terdapat di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, Metro, dan Bandar Lampung. Daerah-daerah tersebut juga cocok untuk pengembangan pasar produk-produk *handycraft* (tapis, batik, anyaman, dll) dan produk UMKM lainnya. Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Pesawaran juga merupakan kawasan yang menyimpan potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Hasil analisis ini juga mengidentifikasi potensi sejenis yang ada di kabupaten-kabupaten lain yang layak dikembangkan.

Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung selain menjadi pusat pemasaran, juga pusat pemerintahan, sehingga perlu didukung infrastruktur yang memadai untuk menopang fungsi-fungsi tersebut. Pengembangan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik kreatif perlu dioperasionalkan. Pengelolaan dan peningkatan infrastruktur ekonomi, transportasi massal, dan penunjang aktivitas publik perlu dioptimalkan. Kota Bandar Lampung bisa mendapatkan manfaat ganda dengan berkembangnya sektor pariwisata yang ada di daerah-daerah sekitarnya. Kabupaten Pesawaran memiliki potensi wisata bahari yang menarik.

Di Lampung Selatan terdapat kawasan industri Way Pisang, juga fasilitas penghubung antar daerah Pelabuhan Bakauheni dan Bandara Radin Inten II. Lampung Timur memiliki Taman Nasional Way Kambas. Agroindustri dan pengembangan *Sains Techno Park* berbasis pertanian terdapat di Kabupaten Lampung Tengah.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang memiliki *exit toll* di beberapa titik di kawasan wisata di Provinsi Lampung makin membuka peluang pengembangan sektor pariwisata daerah. Kawasan wisata di sekitarnya dapat memperoleh manfaat dengan semakin mudahnya akses bagi para pengunjung. Peluang ini perlu disambut secara proaktif oleh pemerintah daerah, dengan mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada, seperti *constraint* utama belum ada transportasi umum menuju kawasan wisata baik dari bandara maupun dari Kota Bandar Lampung. Fasilitas *amenities* juga masih terpusat di Kota Bandar Lampung, seperti hotel berbintang, restoran, travel, maupun outlet oleh-oleh dan cinderamata. Penyediaan *amenities* baik secara kuantitas maupun kualitas di sekitar lokasi wisata masih harus ditingkatkan, termasuk *tour guide* yang profesional, serta sarana prasarana seperti umum maupun fasilitas lain yang memudahkan dalam bertransaksi.

Upaya pengembangan kawasan pariwisata Teluk Lampung yang terintegrasi, dapat dilakukan, antara lain, dengan penyediaan transportasi umum yang nyaman menuju kawasan wisata, baik dari Bandara Radin Inten II maupun dari pusat kota. Selain itu, perlu penyediaan pusat informasi dan pengaduan wisatawan di lokasi-lokasi strategis, menyediakan fasilitas yang memudahkan turis berkunjung, perbaikan ekosistem terumbu karang yang rusak, pengenalan atraksi wisata baru di pantai yang belum terjamah seperti Teluk Nipah, serta dukungan untuk mengangkat kekhasan tapis dan kerajinan khas lain sebagai *souvenir* Lampung. Hal lain yang perlu didorong adalah

peningkatan frekuensi promosi di *website* dan peningkatan kualitas penyelenggaraan festival internasional, percepatan revisi Perda RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, dan pelatihan SDM tenaga kerja pariwisata, baik melalui program sertifikasi dan pendidikan vokasi.

Tiga pilar agroekowisata Lampung adalah agrowisata, infrastruktur agrobisnis, dan lingkungan. Wisata berbasis pertanian (alam) adalah potensi besar daerah ini. Kondisi fasilitas pendidikan dan kesehatan cukup memadai. Pertanian padi sawah didukung irigasi yang baik. Penataan kawasan peternakan sapi berkembang dengan baik dan modern. Masyarakat juga mendukung pengembangan industri jasa perhotelan dan pariwisata. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama warga. Komunitas pertanian cukup kondusif untuk mendukung pengembangan agrowisata. Warga juga memiliki keramahan menerima wisatawan. Potensi agrowisata cukup besar dan Lampung dikenal sebagai bumi agropolitan.



Salah satu ruas JTTS Bakauheni-Terbanggi yang masih dikerjakan

Pengembangan infrastruktur jalan dan fasilitas umum seperti pasar, terminal, ruang terbuka cukup memadai. Ruas jalan tol Sumatera yang melintas di Provinsi Lampung sedang digesa penyelesaiannya oleh pemerintah pusat menjadi peluang tersendiri untuk mendukung percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Daerah ini juga terbuka untuk masuknya investor. Lembaga keuangan yang ada mendukung UMKM dan bisnis. Keterlibatan Dinas Pariwisata, Cipta Karya, dan Dinas Pertanian cukup baik dalam mendukung agrowisata. Industri olahan makanan dan minuman cukup berkembang. Demikian pula industri peternakan berkembang pesat mendukung kawasan agrobisnis peternakan.

Ruang terbuka hijau (RTH) telah memenuhi syarat 30 persen dari seluruh wilayah Provinsi Lampung. Kepedulian masyarakat dan wisatawan menjaga pelestarian lingkungan juga cukup baik, dan perlu ditingkatkan. Infrastruktur jalan menuju kawasan wisata relatif baik, meski perlu peningkatan. Perda RTRW juga telah dibuat dan diimplementasikan dalam menjaga lingkungan.

Dengan latar belakang tersebut, *Roadmap* Penguatan SIDA Provinsi Lampung menetapkan aglomerasi tematik yaitu Agroekowisata Lampung. Produk unggulan yang ada di Provinsi Lampung, antara lain, hasil perkebunan kopi, lada, karet, tebu, kakao, damar, ubi kayu, peternakan, perikanan, serta hasil-hasil kerajinan rakyat. Aneka potensi daerah tersebut dapat dikembangkan untuk dapat bersaing pada skala nasional dan internasional.

6.2. Rencana Aksi

Rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan wujud implementasi strategis Penguatan SIDA dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas dan kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan Sistem

Inovasi Daerah, pendanaan, dan penanggung jawab. Tahapan rencana aksi (*action plan*) penguatan SIDA Provinsi Lampung 2019–2023 dapat dilihat pada Gambar berikut :



Tahapan Rencana Aksi (*Action Plan*) Agroekowisata Lampung

Tahap pemantapan rencana aksi penguatan SIDA Provinsi Lampung menjadi salah satu pertimbangan dan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kesuksesan dari pelaksanaan penguatan SIDA tidak terlepas dari kolaborasi antara pihak akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, dan komunitas masyarakat. Sedangkan anggaran untuk mendukung kawasan

Agroekowisata Lampung di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro selain bersumber dari APBD Provinsi Lampung, juga dapat melalui bantuan anggaran dari APBN dan APBD Kabupaten/Kota bersangkutan, maupun pihak swasta.



**BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

AGROEKOWISATA LAMPUNG



PENERBIT

BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG

Jl. Kantor Pos No.2 Telukbetung, Bandar Lampung

Telp/Fax. (0721) 5605759

www.balitbangda.lampungprov.go.id

balitbangdalampung@gmail.com

